****

**AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS KARENA KEPAILITAN DAN PERUSAHAAN YANG TETAP AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAANNYA (*GOING CONCERN*)**

**(STUDI KASUS PADA PT. MD (d/h PT. MDC) DAN PT. PPS)**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

**TENRI SUMPALA, S.H.**

**11010115410102**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

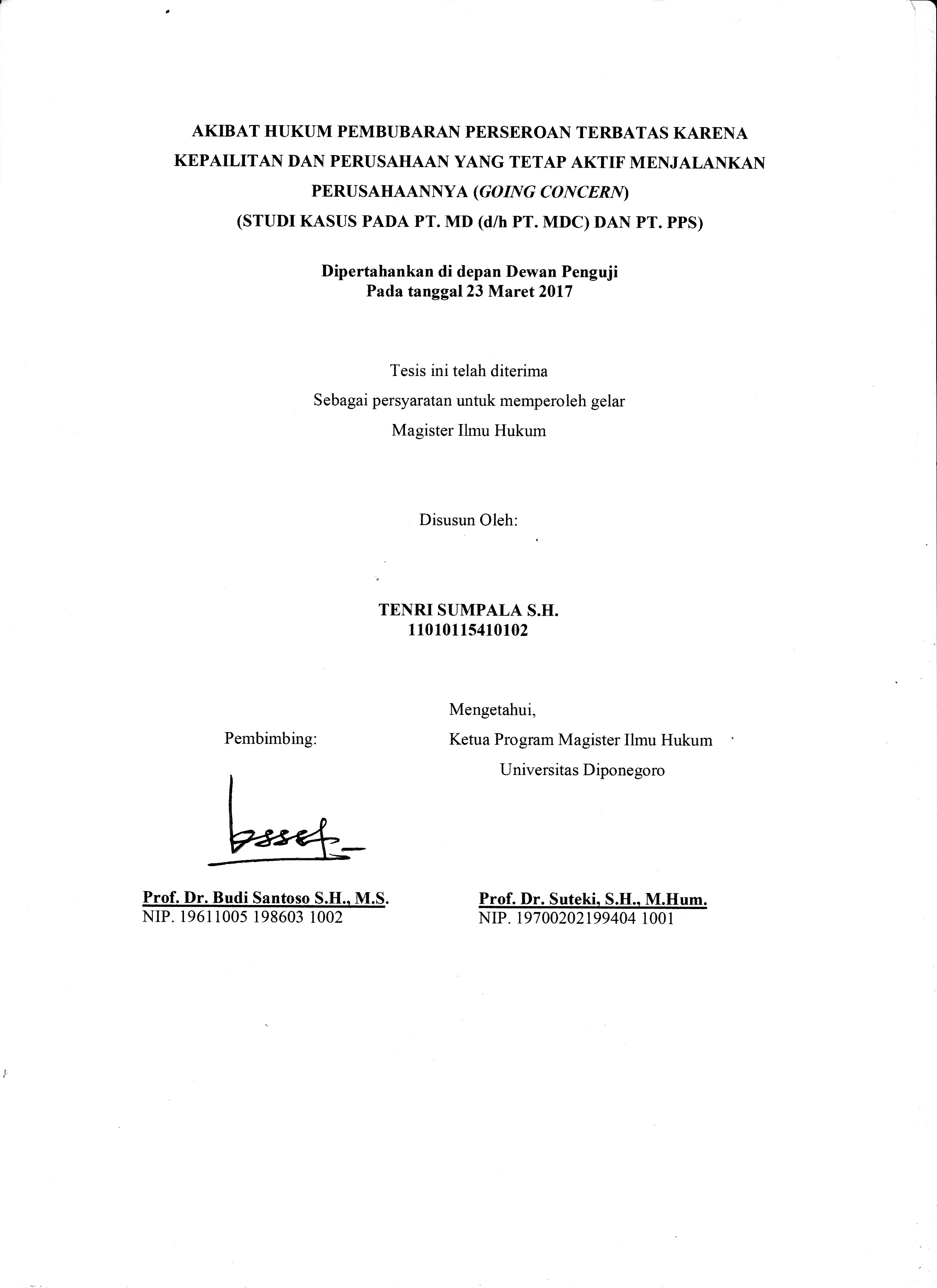
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

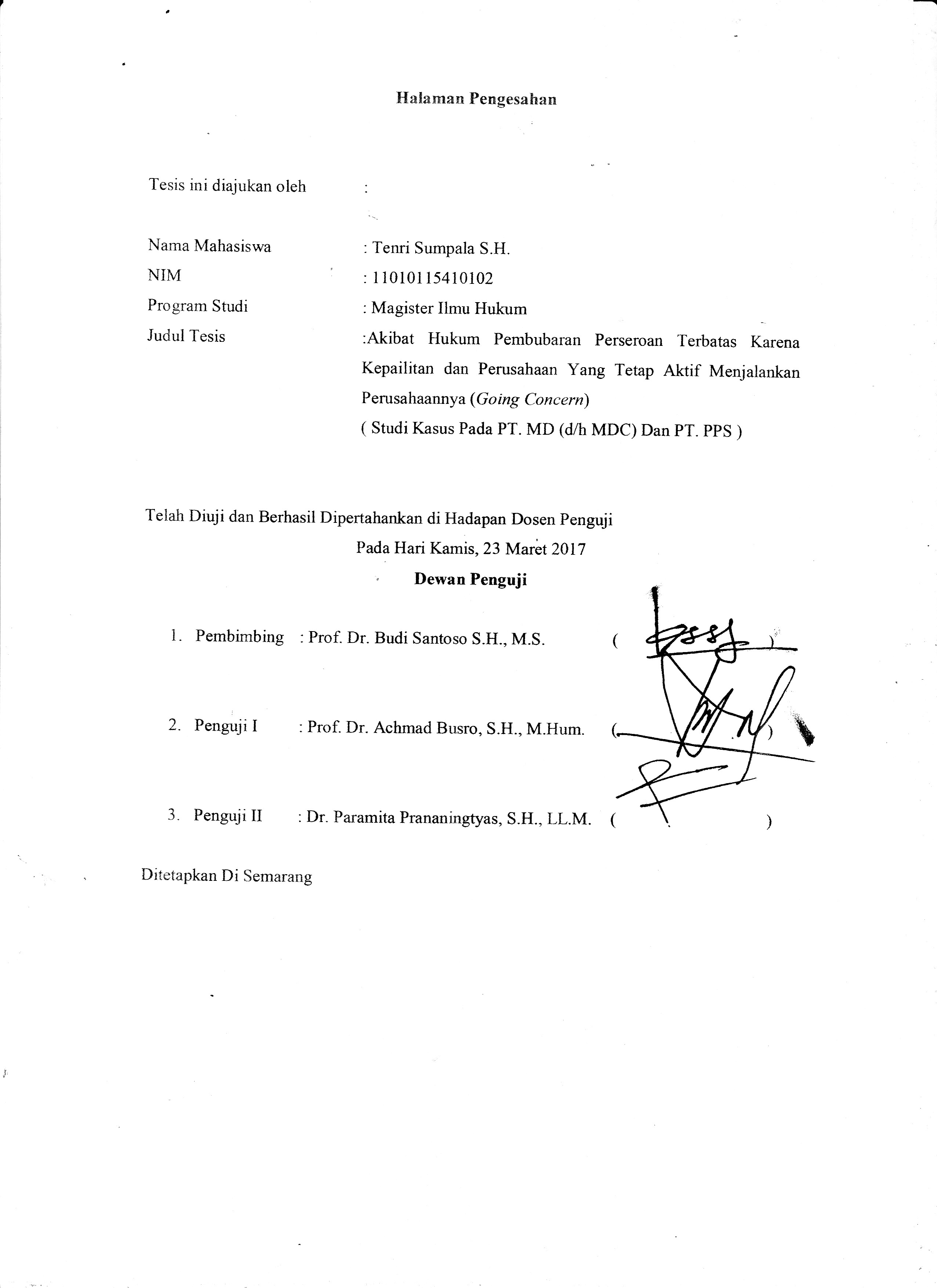
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2017**

****

****

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Tenri Sumpala, S.H., menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjaanaan Strata Satu (S2) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Maret 2017

Penulis

**Tenri Sumpala, S.H.**

**NIM. 11010115410102**

**MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO :**

*“Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh hanyalah dilakukan oleh orang – orang yang tidak pernah bersyukur”*

*“What we should fear isn’t failure but the heart that is no longer brave enough to take risks and embrace challenge”*

KUPERSEMBAHKAN TESIS INI UNTUK:

KEDUA ORANG TUAKU

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS KARENA KEPAILITAN DAN PERUSAHAAN YANG TETAP AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAANNYA (*GOING CONCERN*) (STUDI KASUS PADA PT. MD (d/h PT. MDC) DAN PT. PPS)**

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagai syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis memahami bahwasanya terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan serta partisipasi berbagai pihak. Teriring do’a agar selalu selamat, bahagia dunia dan akhirat, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.;
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universiras Diponegoro;
3. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
4. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang di tengah kesibukkannya menjalani pekerjaan sebagai dosen di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, masih dapat membimbing penulis dengan baik dan sabar, memberikan pengarahan, pembelajaran, sumbangan pemikiran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing yang di tengah kesibukkannya menjalani pekerjaan sebagai dosen di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, masih dapat membimbing penulis dengan baik dan sabar, memberikan pengarahan, pembelajaran, sumbangan pemikiran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
6. Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulisan ini;
7. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.;
8. Kedua Orangtua Ir. Dirhamzah S. dan Dr. Nirwana, S.H., M.Hum. untuk semangat dan cintanya yang tulus, Tenri Sanna, S.H., M.H. sebagai kakak penulis yang memberikan motivasi;
9. Keluarga – keluarga dari Kakek Panandrang dan Nenek Rahmawati, serta Om dan tante penulis To Wadeng, Fatmawati Page, dan Indrayani hingga sepupu Penulis Riski Haryani Harun, Riska Sartika Harun, Tenri Faradilla, Achmad Hendra, dan Achmad Rizaldy dan seluruh keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang tidak berhenti mendukung dan menyemangati penulis.
10. Sahabat sekaligus saudara bagi penulis Sarah Basbeth, Putri Gita S, Dyah Savitri, Ummy Khulzum, Novi Ariesta, dan Eric Andrian, yang selalu mendukung dan membantu penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, ,jangan pernah memadamkan cahaya persaudaraan ini, kalian benar-benar berarti bagi penulis;
11. Sahabat Penulis Atika Anggraini, Rahmanto Putra, Herga Putranto, Prasetya Pristanto, dan Budi Evantri yang selalu membantu dan mendukuk penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
12. Teman-teman mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
13. Semua pihak dengan tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Maret 2017

Penulis,

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**  i

**HALAMAN PENGESAHAN**  ii

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**  iii

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN** v

**KATA PENGANTAR**  vi

**DAFTAR ISI**  viii

**ABSTRAK**  xii

**ABSTRACT** xiv

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Penelitian 1
2. Rumusan Masalah 19
3. Tujuan Penelitian 20
4. Manfaat Penelitian 20
5. Manfaat Teoritis 20
6. Manfaat Praktis 20
7. Kerangka Pemikiran 21
   * + 1. Kerangka Konseptual 22
       2. Kerangka Teoritik 23
8. Metode Penelitian 29
9. Metode Penelitian . 30
10. Spesifikasi Penelitian 30
11. Teknik Pengumpulan Data 31
12. Metode Penyajian Data 33
13. Teknik Analisis Data 33
14. Original Penulisan 35
15. Sistematika 37

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT) 39
2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT) 39
3. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) 40
4. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum 41
5. Organ Perseroan Terbatas 43
6. Tinjauan Umum Mengenai Pembubaran Perseroan Terbatas 46
   * + 1. Pengertian Pembubaran Perseroan Terbatas 46
       2. Dasar Terjadinya Pembubaran Perseroan 47
       3. Pembubaran Wajib Diikuti dengan Likuidasi 60
       4. Perseroan Tidak Dapat Melakukan Perbuatan Hukum 62
       5. Semua Ketentuan yang berlaku terhadap Direksi, *Mutatis Mutandis* berlaku bagi Likuidator 63
7. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan 65

Dasar Hukum Kepailitan 65

Pengertian Kepailitan 66

Menurut Kamus 66

Pendapat Para Sarjana 68

Menurut Undang-Undang Kepailitan 70

Tujuan Kepailitan 70

Syarat-Syarat Kepailitan 73

Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit 76

Mekanisme Pengajuan Permohonan Pailit 79

Akibat Kepailitan 82

Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit 90

1. Tinjauan Umum Mengenai *Going Concern* 91
2. Pengertian Melanjutkan Usaha (*Going Concrn*) 91
3. Yang Dapat Menjalankan *Going Concern* /Melanjutkan Usaha 92
4. Prosedur Pengajuan Melanjutkan Usaha (*Going Concern*) 93

Usulan dan Rapat Mengenai Kelanjutan Perusahaan Debitor Pailit 93

Putusan Hakim Pengawas Mengenai Kelanjutan Perusahaan Debitor Pailit 95

1. Pertanggung Jawaban terhadap Kelanjutan Usaha (*Going Concern*) 96

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Akibat Hukum terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas pada Kepailitan 97
2. Pembubaran Terbatas 97
3. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit 118
4. Akibat Hukum Terhadap Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Bubar Akibat Kepailitan dan Perusahaan yang Mengalami *Going Concern* 120
5. Akibat Hukum Terhadap Status Badan Hukum Perseroan Berbatas yang Bubar Akibat Kepailitan 121
6. Kedudukan Perusahaan yang Bubar Akibat Kepailitan 121
7. Pembubaran PT. MD (d/h PT. MDC) Akibat Kepailitan 125
8. Akibat Hukum Terhadap Status Badan Hukum Perseroan Berbatas Akibat *Going Concern* 129
9. Kedudukan Perusahaan Pailit yang Melanjutkan Usaha (*Going Concern*) 129
10. Status Perseroan Terbatas yang Melanjutkan Usaha (*Going Concern*) 140
11. *Going Concern* Pada Kepailitan PT. PPS 152

**BAB VI PENUTUP**

1. Kesimpulan 165
2. Akibat Hukum terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas pada Kepailitan 165
3. Pembubaran Perseroan Terbatas 165
4. Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Mengalami Kepailitan 166
5. Akibat Hukum Terhadap Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Bubar Akibat Kepailitan dan Perusahaan yang Mengalami (*Going Concern*) 166
6. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Bubar Akibat Kepailitan 166
7. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Akibat *Going Concern* 167
8. Saran 168

**DAFTAR PUSTAKA**  xv

**LAMPIRAN** xxi

**ABSTRAK**

**AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS KARENA KEPAILITAN DAN PERUSAHAAN YANG TETAP AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAANNYA (*GOING CONCERN*)**

**(STUDI KASUS PADA PT. MD (d/h PT. MDC) DAN PT. PPS)**

Kepailitan suatu Perseroan Terbatas mengakibatkan beralihnya kewenangan atas pengurusan dan pemberesan atas seluruh kekayaan Perseroan Terbatas tersebut kepada Kurator. Apabila dalam kepailitan tersebut tidak tercapai perdamaian atau tidak diajukan perdamaian atau harta pailit tidak cukup untuk melunasi seluruh utang, maka perusahaan pailit tersebut dinyatakan berada dalam keadaan likuidasi dan dapat dibubarkan. Namun, Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit tidak selalu harus berakhir dengan likuidasi tetapi Perusahaan tersebut dapat dimohonkan untuk dapat dilakukan untuk dapat dilanjutkan kegiatan usahanya (*going concern*).

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada, sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui penelusuran literature/dokumen (studi kepustakaan), dan data yang berasal dari lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan sumber-sumber data.

Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan eksistensi Perseroan Terbatas berhenti dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnin untuk selama-lamanya. Kemudian diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Akibat hukum terhadap status badan hukum perseoran terbatas yang bubar akibat kepailitan, yaitu berakhirnya status badan Hukum Perseroan dalam Berita Acara Republik Indonesia. Sedangkan akibat hukum terhadap status badan hukum perseoran terbatas akibat *going concern*, yaitu kepailitan tidak mengakibatkan berakhirnya status badan hukum suatu perseroan selama tidak dilakukan likuidasi dan tidak ada putusan dari pengadilan.

*Going Concern* merupakan suatu alternative yang dapat dilakukan oleh kurator dalam hal memaksimalkan boedel pailit dimana dengan berhasilnya *going concern* tersebut dapat menambah boedel pailit bahkan apabila kepailitan telah berakhir harta dari debitor dapat bertambah dan dapat dipergunakan untuk menjalankan perusahaannya setelah masa kepailitan berakhir.

***Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pembubaran Perseroan Terbatas, Pailit, Going Concern***

**ABSTRACT**

**THE LAW EFFECT TO LIQUIDATION OF LIMITED LIABILITY IN TERMS OF BANKRUPTCY AND TO COMPANY THAT STILL ACTIVE TO OPERATE ITS BUSINESS (GOING CONCERN)**

**(CASE STUDY AT PT. MD (d/h PT. MDC) AND PT. PPS)**

Bankruptcy of Limited Liability Company resulted in authority over management and settlement of all the wealth of the Limited Liability Company is being shifted to receiver. In the case of that bankruptcy there is no accord achieved or the accord is not submitted or bankruptcy property is not enough to pay off the entire debt, then that bankrupt company is declared in a liquidation condition and can be liquidated. However, Limited Liability Company that has been declared in such condition does not always have to end with liquidation, but the company could be proposed to be able to continue its business activity (going concern).

This type of research is normative juridical research. The specification of research is analytical descriptive that provides overview and describes research object based on existing fact, so it can draw a conclusion related to the analyzed issues. The collecting data technique used in this research are through literature review and the data that are derived from field associated with the research object, with data sources.

Liquidation is an action that resulted in the existence of a Limited Liability Company is retired and no longer engage in business activities forever. Then followed by administration processes such as notification, announcements, and termination of employment. The legal consequences toward the legal entity status of Limited Liability Company which is liquidated because of bankruptcy, is the termination of legal entity status of Limited Liability Company in official report of Republic of Indonesia. Meanwhile, the legal consequences toward the legal entity status of Limited Liability Company due to going concern is bankruptcy did not result in the termination of legal entity status of Limited Liability Company as long as liquidation is conducted and there is no judgement from court.

Going Concern is an alternative way that can be done by receiver in terms of maximizing bankrupt estate where the success of going concern can give more bankrupt estate even if the bankruptcy has been over the property from debtor can grow and can be used to run the company after the bankruptcy ends.

**Keywords :** *Limited Liability Company, Company Liquidation, Bankruptcy, Active company, Going Concer*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Dalam perkembangan di era globalisasi yang semakin pesat khususnya di bidang Ekonomi maka mulailah tumbuh berbagai macam kegiatan usaha dan timbullah keinginan untuk mendirikan suatu perusahanaan yang bergerak dalam berbagai bidang baik di bidang perdagangan, kegiatan industri dan kegiatan pelaksanaan jasa.

Perkembangan perekonomian di Indonesia sudah sedemikian pesatnya, khususnya kegiatan usaha di bidang properti. Namun, banyak pula perusahaan yang bergerak di bidang properti yang mengalami kegagalan dan berakhir pailit, seperti yang terjadi pada PT. Pelita Properindo Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. PPS dan PT. Megacity Development Corporation yang selanjutnya disebut PT. MD (d/h MDC). PT. PPS dan PT. MD (d/h MDC).

PT. MD dan PT. PPS merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Properti dalam hal Rumah Susun/Apartement yang dimohonkan pailit karena tidak menyelesaikan pembangunan Rumah Susun/Apartement pada waktu yang telah diperjanjikan.

Kepailitan suatu Perseroan Terbatas mengakibatkan beralihnya kewenangan atas pengurusan dan pemberesan atas seluruh kekayaan Perseroan Terbatas tersebut kepada Kurator. Apabila dalam kepailitan tersebut tidak tercapai perdamaian atau tidak diajukan perdamaian atau harta pailit tidak cukup untuk melunasi seluruh utang, maka perusahaan pailit tersebut dinyatakan berada dalam keadaan likuidasi dan dapat dibubarkan. Namun, Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit tidak selalu harus berakhir dengan likuidasi. Perseroan Terbatas yang berada dalam pailit dapat dimohonkan untuk dapat dilakukan untuk dapat dilanjutkan kegiatan usahanya (*going concern*) seperti yang terjadi pada PT. PPS.

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha dibidang perekonomian yang meliputi perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan keuangan. Usaha tersebut meliputi tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dibidang perekonomian yang dilakukan setip pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.[[1]](#footnote-1)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dapat diketahui bahwa :

“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba

Pengertian diatas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu :[[2]](#footnote-2)

* + - 1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia.
      2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dijalankan terus- menerus untuk mencari keuntungan.

Dalam unsur – unsur diatas dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatannya secara terus menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan ekonomi yang baru dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundangan lainnya terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut :[[3]](#footnote-3)

1. Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah badan usaha yang kepemilikannya dimilik oleh satu orang.
2. Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi, dan BUMN.
3. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum atau disebut juga perusahaan persekutuan, yang diartikan badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama – sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Badan usaha yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata, persekutuan firma dan persukutuan komanditer.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa suatu perusahaan atau persekutuan dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Pada persekutuan yang berbadan hukum salah satunya dapat berbentuk Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah :

“Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini.”

Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban yang mempunyai arti *artificial person*, sehingga Perseroan Terbatas sebagai lembaga tidak menjalankan usahanya secara sendiri, tetapi yang menjalankan usahanya adalah organ perusahaan yang terdiri dari Rapat umum pemegang saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi.[[4]](#footnote-4)

Ketiga organ tersebut dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewenangan masing masing yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (4),(5), dan (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau anggaran dasar. (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang PT).
2. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan atau kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik dalam maupum di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang PT).
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang PT).

Para Pengusaha dalam mengembangkan usahanya, pasti membutuhkan dana yang biasanya disebut modal. Modal merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembiayaan perusahaan. Modal sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu modal intern dan modal ekstern. Dalam hal mencukupi modal tersebut maka seseorang atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dapat melakukan pinjaman dari pihak lain.

Pinjaman yang dilakukan Perseroan atau Perusahaan tersebut merupakan utang piutang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, namun adakalanya perusahaan tersebut tidak dapat mengembalikan utang yang terdiri dari utang pokok dan bunga yang telah jatuh tempo tersebut para kepada kreditor.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kreditor menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang tersebut adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.

Perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya kepada kreditor maka Kreditor dan Debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan Pailit. Terhadap Perusahaan yang berbadan hukum, dalam hal ini Perseroan Terbatas yang dimohonkan pailit, pertanggungjawabannya adalah terbatas pada asset yang dimiliki dari Perseroan Terbatas, apabila suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut, berbeda halnya dengan perusahaan yang tidak berbadan hukum yang apabila dimohonkan pailit maka pertanggungjawabannya tidak terbatas pada kekayaan dari perusahaan tetapi juga ke dalam kekayaan pribadi diluar perusahaannya atau pertanggung jawabannya secara tanggung renteng.

Perseroan Terbatas yang dimohonkan pailit oleh Debitor maupun Kreditor maka Direksi dari Perseroan Terbatas Tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi apabila Direksi tersebut terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan dan menjalankan perusahaan dengan itikad tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan terjadi pabila Debitor mempunyai dua orang kreditor atau lebih, sedikitnya satu utang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

“Kepailitan merupakan ketidakmampuan Debitor atau ketidakmauan dalam membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada para Kreditornya. Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.”

Dalam Undang-Undang tersebut dapat ditinjau bahwa kepailitan terjadi tidak hanya dikarenakan Debitor tidak dapat membayar utang-utangnya tetapi ada juga yang disebabkan karena Debitor tidak mau membayar utang-utangnya itu sendiri. Utang tersebut terkadang digunakan Debitor untuk melanjutkan kegiatan usahanya tetapi terkadang resiko yang ada lebih besar dibandingkan utang yang didapat sebagai modal dasarnya.

Syarat-syarat permohonan pailit sebagimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih *(Concursus Creditorum)*, Syarat Harus Adanya Utang, Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, antara lain :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatih waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditor”

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri, satu orang kreditor atau lebih, dalam hal kepentingan umum dapat diajukan oleh jaksa, Pada saat ini dengan adanya Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan apabila Debitornya Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah Otoritas Jasa Keuangan, Apabila Debitor merupakan Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan.

Peraturan kepailitan memiliki tujuan dari kepailitan yaitu untuk mempergunakan harta kekayaan milik Debitor yang diperkirakan sudah tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya secara adil dan berimbang yang dilaksanakan oleh Kurator dan dibawah pegawasan seorang Hakim Pengawas. Dengan demikian, kreditor yang menuntut pemenuhan prestasi atau penagihan utang-piutangnya tidak lagi pada Debitor pailit langsung melainkan melalui kurator.[[5]](#footnote-5)

Kepailitan bertujuan memberikan jaminan kepada para Kreditor untuk mendapatkan haknya terkait utang-utang yang dipinjam Debitor, Kepailitan-pun bertujuan untuk melindungi hak-hak dari Debitor agar tidak terjadi eksekusi secara paksa yang dilakukan oleh Kreditor terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdata yang dimana segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dalam perkara kepailitan akan melibatkan beberapa pihak yakni hakim pengawas yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, Debitor sebagai orang yang berutang, Kreditor sebagai pihak yang berpiutang dan kurator sebagai pihak yang bertugas untuk mengeksekusi harta dari Debitor yang telah dinyatakan pailit.

Proses dalam kepailitan awalnya pengajuan Permohonan Pailit yang diajukan oleh seorang advokat atau penasehat hukum Kreditor atau debitor melalui Panitera Pengadilan Niaga dimana pengajuan Permohonan tersebut harus memenuhi syarat pada Pasal 2 Ayat (3),(4) dan (5) disertai semua dokumen dan alat bukti lain yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Dokumen serta alat bukti yang diajukan oleh advokat atau pensehat hukum dari Kreditor atau Debitor tersebut melampirkan nama dari Debitor dan Para Kreditor serta kontrak atau perjanjian yang telah disetujui oleh Debitor dan Para Kreditor, selanjutnya advokat atau penasihat hukum dari Kreditor dan Debitor melampirkan laporan kekayaan, aset yang dimiliki oleh Debitor serta lampiran lampiran lain yang mendukung. Selanjutnya Hakim akan mempelajari pernyataan permohonan pailit tersebut, jika memenuhi syarat maka akan ditetapkan hari sidang.

Setelah ditetapkan hari sidang sesuai dengan Pasal 8 Undang- Undang KPKPU maka Pengadilan wajib memanggil Debitor apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, kejaksaan, OJK, BPPM dan Menteri Keuangan, dan memanggil kreditor apabila pernyataan tersebut diajukan oleh Debitor dan apabila ada keraguan dalam persyaratan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Pemanggilan terhadap Debitor sendiri dilakukan oleh Juru Sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Permohonan pernyatan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terbukti. Putusan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.[[6]](#footnote-6)

Putusan atas permohonan pernyataan pailit sesuai dengan pasal 8 ayat (5) wajib memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijakdikan dasar dalam mengadili dan pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari Hakim anggota atau Ketua Majelis.

Pada saat Hakim memutuskan Debitor pailit maka Hakim akan mengangangkat Kurator untuk pemberesan harta pailit atau *boedel* pailit tersebut dan Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, hal tersebut ada pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, maka seluruh perkataan yang diadakan antara Debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan Debitor.

Suatu perusahaan pailit yang dinyatakan insolvensi dapat dinyatakan bubar apabila perusahaan tersebut diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan perusahaan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perusahaan dalam rangka likuidasi.

Insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivanya lebih kecil dari pasivanya. Dengan kata lain utang perusahaannya lebih besar daripada harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai *Technical insolvency.* Sedangkan insolven dalam tahap pemberesan kepailitan adalah satu tahap dimana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai dihomologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.[[7]](#footnote-7)

Pengurusan adalah menginventarisasi, menjaga dan memelihara agar hata pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai, dan bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai.[[8]](#footnote-8) Sedangkan Pemberesan sendiri adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utangnya sesuai dengan penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas, menurut Pasal 142 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dasar berakhirnya suatu perseroan dikarenakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggara dasar telah berakhir, Penetapan Pengadilan dan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap dimana harta pailit perseroan terbatas tidak cukup untuk membayar biaya pailit.

Pembubaran Perseroan Terbatas sering terjadi dikarenakan Putusan Pengadilan yang menyatakan suatu Perusahaan atau Perseroan Terbatas Tersebut Pailit dikarena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UUPT dan Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim Pengadilan Niaga memutus suatu perusahaan pailit, maka kurator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga tersebutlah yang berwenang untuk mengatur dan membagi harta pailit serta menentukan Kreditor mana yang harus lebih didahulukan pembayarannya, Kreditor dalam kepailitan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, yaitu Kreditor Konkuren (*Unsecured Creditor*), Kreditor Preferen (*Secured Creditor*), Kreditor separatis.[[9]](#footnote-9)

Setelah adanya putusan pailit yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Niaga maka dalam hal ini sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) maka Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak putusan disampaikan. Dalam pasal tersebut kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit menjadi kewenangan dari kurator.

Dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meskipun Pailit Debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya tetapi Debitor tidak kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sepanjuang perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum atas harta kekayaan yang telah dikuasai kurator.

Langkah pertama yang dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pailit dalam proses pengurusan dan penguasaan harta pailit sesuai dengan Pasal 15 Ayat (4) adalah mengumumkan kepailitan Debitor dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditentukan oleh hakim pengawas. Setelah adanya pengumuman kepailitan yang diumumkan oleh kurator maka selanjutnya kurator melakukan rapat verifikasi utang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat verifikasi ini dilakukan untuk mencocokkan utang-utang si pailit sebagai klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit. Setelah rapat verifikasi selesai maka kurator harus memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dengan memberikan pandangan kepada kreditor tetang apa yang dianggap perlu.

Menurut Pasal 144 dan Pasal 145 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang walaupun Debitor telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga tetapi Debitor diberikan kesempatan untuk untuk mengajukan rancangan perdamaian dengan para kreditornya 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi dilakukan. Perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua/setengah) jumlah kreditor konkuren yang hadir dan haknya diakui, maka rancangan perdamaian tersebut harus disahkan oleh pengadilan Niaga.

Rancangan perdamaian yang diajukan oleh Debitor apabila dalam rapat tersebut para Kreditor memutuskan untuk menolak rancangan perdamaian tersebut, maka Debitor pailit tidak dapat mengajukan rancangan perdamaian yang kedua dan proses kepailitan dilanjutkan ketahap berikutnya, yakni tahap insolven.

Setelah tahap insolven, kurator melakukan pemberesan harta pailit dan menjual harta pailit di muka umum atau dibawah tangan dengan izin hakim pengawas. Sesuai dengan Pasal 202 Undang-Undang Kepailitan Dalam hal harta pailit mencukupi pembayaran utang-utang Debitor pailit kepada para kreditornya, maka berakhirlah kepailitan tersebut, sesuai Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan maka Debitor dapat mengajukan permohonan rehabilitasi atau pemulihan status Debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas kekayaannya.

Dalam proses pemberesan harta pailit tersebut, ternyata tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang Debitor kepada para kreditor maka jika Debitor pailit suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang-utang badan hukum yang belum terbayarkan menjadi utang diatas kertas saja tanpa bisa dilakukan penagihan karena badan hukumnya sudah bubar. Sedangkan apabila Debitor pailit itu subjek hukum manusia, maka kepailitan tersebut akan dicabut oleh pengadilan.[[10]](#footnote-10)

Contoh kasus tersebut telah terjadi pada PT. Pelita Properindo Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. PPS dan PT. Megacity Development Corporation yang selanjutnya disebut PT. MD (d/h MDC). PT. PPS dan PT. MD (d/h MDC) merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Properti dalam hal Rumah Susun/Apartement.

Dalam kepailitan PT PPS :

1. Subjek Hukumnya adalah PT. PPS selaku Debitor dan Terdiri dari 5 (lima) Kreditor selaku Pemohon Pailit
2. Objek hukumnya adalah Apartemen Palazzo
3. Alasan dari kelima kreditor tersebut mengajukan permohonan pailit :

* Para Kreditor telah membeli secara lunas dari satuan rumah susun Apartemen Palazzo tersebut
* Debitor tidak menyelesaikan pembangunan rumah susun tersebut tepat waktu dan tidak menyerahkan satuan rumah susun Apartemen Palazzo kepada Para Kreditor.
* Debitor belum juga dapat melaksanakan kewajibannya.

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara kepailitan tersebut antara lain, yaitu :

* Debitor mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih
* Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
* Antara Para Kreditor dan Debitor terdapat hubungan antara Pembeli (Kreditor) dan Penjual (Debitor), yaitu hubungan jual-beli Satuan Rumah Susun Apartemen Palazzo.

Dalam kepailitan PT. MD tersebut:

1. Subjek hukumnya adalah PT. MD (d/h PT. MDC) selaku Debitor dan 10 (sepuluh) Kreditor Pemohon Pilit.
2. Objek hukumnya adalah Apartemen Dukuh Golf Jakarta (d/h Apartemen Jakarta Golf Village)
3. Alasan dari kesepuluh Kreditor tersebut mengajukan permohonan pailit:

* Debitor tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan satuan rumah susun Apartemen Dukuh Golf Jakarta.
* Para Kreditor telah melayangkan beberapa surat peringatan/somasi agar Debitor dapat segera menyelesaikan pembangunan rumah susun tersebut.

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara kepailitan tersebut antara lain, yaitu:

* Debitor tidak menyelesaikan pembangunan Satuan Rumah Susun seluruhnya;
* Debitor masih belum menyelesaikan pembangunan unit rumah susun lengkap dengan sarana dan prasarana dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Para Kreditor;
* Antara Para Kreditor dan Debitor terdapat hubungan antara Pembeli (Kreditor) dan Penjual (Debitor), yaitu hubungan jual-beli Satuan Rumah Susun Apartemen di Jakarta Golf Village;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan yang isinya menyatakan PT. PPS dan PT. MD (d/h MDC) pailit dengan segala akibat hukumnya.

Kasus yang penulis bahas ini setelah dinyatakan pailit, PT. MD (d/h MDC) kehilangan hak perdatanya dan berpindah ke kurator serta perusahaan tersebut dilikuidasi sedangkan pada PT.PPS setelah dinyatakan pailit perusahaan tersebut tetap aktif dikarenakan *going concern*. Dalam perkara PT.PPS karena perusahaan tersebut bergerak di bidang satuan rumah susun (apartement) dan sudah berjalan beberapa tower maka curator melihat prospek yang dapat menguntungkan *boedel* pailit apabila usahanya dilanjutkan, maka dari itu curator meminta izin kepara Hakim Pengawas untuk melanjutkan usahanya dan dikabulkan sampai saat ini dan sudah berjalan dengan baik dan hampir seluruh tower satuan rumah susun (apartement) terisi seluruhnya.

Keberlajutan Usaha atau *Going Concern* merupakan asumsi akuntansi yang mengharapkan sebuah usaha dapat berlanjut terus dalam waktu yang tak terbatas, yang juga disebut *continuity*. Hal ini merupakan dasar untuk menggunakan biaya historis dalam menilai perkiraan yang lebih baik daripada nilai likuidasi, karena perusahaan dianggap akan terus menerus ada.[[11]](#footnote-11)

*Going Concern* adalah suatu keadaan dimana perusahaan dapat / telah beroperasi dalam jangka waktu kedepan yang dipengaruhi oleh keadaan finansial dan non finansial dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. *Going Concern* juga dapat dikatakan sebagai kontinuitas yang merupakan asumsi akuntansi yang memperkirakan suatu bisnis akan berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

1. **RUMUSAN MASALAH**

Pembahasan dalam Tesis yang berjudul “Akibat Hukum Pembubaran Perusahaan Pada Perusahaan Pailit dan Perusahaan yang *Going Concern* Pada Kepailitan” akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pembubaran Perseroan Terbatas pada Kepailitan *?*
2. Bagaimana akibat hukum terhadap status badan hukum Perseroan Terbatas yang bubar akibat kepailitan dan perusahaan pailit yang tetap aktif menjalankan perusahaannya (*Going Concern) ?*
3. **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pembubaran perusahaan pada perusahaan pailit
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap status badan hukum suatu perusahaan yang bubar akibat kepailitan dan perusahaan pailit yang tetap aktif menjalankan perusahaannya (*Going Concern).*
3. **MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan fokus permalahan dan tujuan penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penulis berharap secara teoritis hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum perusahaan dan kepailitan khususnya yang berkaitan dengan Pembubaran perusahaan akibat dari kepailitan dan *Going Concern* dalam hal kepailitan, dapat menambah bahan pustaka dibidang hukum dagang, hukum kepailitan, hukum ketenagakerjaan dan berharap menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.

1. **Manfaat Praktis**

Penulis berharap secara praktis hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pertimbangan terhadap penegak hukum dan pemerintah untuk lebih luas memahami peraturan-peraturan dalam menangani kasus pembubaran perusahaan dan kepailitan khususnya dibidang *Going Concern* dalam kelanjutan usaha yang telah diputus Pailit sehingga jika ada permasalahan seperti ini lagi, dapat diatasi.

1. **KERANGKA PEMIKIRAN**

Perseroan Terbatas

UU No. 40 Tahun 2007

PT Pailit yang mengalami *Going Concern*

Teori

Pengadilan Niaga

PT yang dipailitkan

* Teori Badan Hukum
* Prinsip – Prinsip Kepailitan
* Teori Perlindungan Hukum

Rencana perdamaian tidak disetujiu (Pasal 151 UUK)

Rencana perdamaian tidak disetujiu (Pasal 151 UUK)

Insolven (Ps. 178 (1))

Insolven (Ps. 178 (1))

Pemberesan Harta Pailit dan penjualan harta pailit

Pemberesan Harta Pailit dan penjualan harta pailit

Dilakukan *Going Concern*

Harta Pailit tidak cukup

Perusahaan tidak bubar (Tetap Beroprasional (*Going Concern*)

Likuidasi / badan hukum bubar demi hukum

Legal Isu

mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap status badan hukum suatu perusahaan yang bubar akibat kepailitan dan perusahaan pailit yang Tetap Aktif Menjalankan Perusahaannya (*Going Concern)*

Mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pembubaran perusahaan pada perusahaan pailit

1. **KERANGKA KONSEPTUAL**

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Istilah Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.[[12]](#footnote-12)

Pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang – Undang Perseroan Terbatas adalah penghentian kegiatan usaha perseroan namun penghentian kegiatan usaha ini tidak mengakibatkan status hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

Insolvensi adalah ketidakmampuan membayar dari harta pailit karea hukum yang disebabkan Debitor Pailit tidak mengajukan rencana perdamaian, mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.[[13]](#footnote-13)

Likuidasi (*vereffening, winding – up*) mengandung arti pemberesan penyelesaian dan pengakhiran urusan Perseroan setelah adanya keputusan apakah itu berdasarkan keputusan RUPS atau berdasarkan Penetapan Pengadilan yang menghentikan atau membubarkan Perseroan.[[14]](#footnote-14)

*Going Concern* menurut Adji Mulawarman dalam Bernard Nainggolan menyatakan *Going Concern* merupakan salah satu konsep penting akuntansi konvensional. Inti *Going Concern* terdapat pada *Balance Sheet* perusahaan yang harus merefleksikan nilai perusahaan untuk menentuakn eksistensi dan masa depannya. Lebih detail lagi, *Going Concern* adalah suatu keadaan bahwa perusahaan dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu kedepan, dan hal ini dipengaruhi oleh keadaan finansial dan non financial

1. **KERANGKA TEORITIK**

Kerangka teori diperlukan untuk memperkuat kerangka konsep melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Badan Hukum, Prinsip Kepailitan, Teori Kepemilikan, Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum dan Prinsip Tanggungan.

Terdapat beberapa teori badan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Fiksi

Teori Fiksi ini berpendapat bahwa badan hukum hanya suatu fiksi saja. Sebenarnya badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.[[15]](#footnote-15)

1. Teori Harta Kekayaan Bertujuan

Teori Harta Kekayaan Bertujuan ini menganut pandangan bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi milik dari perkumpulan yang bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subjek hukum.[[16]](#footnote-16)

1. Teori Organ atau Teori Realis

Menurut teori ini, badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan alat perlengkapannya, seperti pengurus, komisaris dan rapat anggota.[[17]](#footnote-17)

1. Teori Pemilikan Bersama

Menurut Teori ini, badan hukum tidak lain merupakam perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Itulah yang menyebabkan hak dan kewajiban badan hukum tersebut pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Jadi, sebenarnya badan hukum itu hanya konstruksi yuridis belaka.[[18]](#footnote-18)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengertian kepailitan, yaitu:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam Kepailitan terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.[[19]](#footnote-19)

1. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *pari passu prorate parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara *proporsional* antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.[[20]](#footnote-20)

1. Prinsip *Structured Creditors*

Adapun prnsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kreditor Separatis;
2. Kreditor Preferen;
3. Kreditor Konkuren.[[21]](#footnote-21)
4. Prinsip Utang

Dalam proses acara kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.[[22]](#footnote-22)

1. Prinsip *Debt Collection*

*Debt collection principle* (prinsip *debt collection*) mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.[[23]](#footnote-23)

1. Prinsip *Debt Polling*

Prinsip *debt polling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi di antara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorate parte*, serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (*structured creditors principle*).[[24]](#footnote-24)

1. Prinsip *Debt Forgiveness*

Prinsip *debt forgiveness* (*debt forgiveness principle*) mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan (*pressie middle*), akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yakni, merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan *agreement* semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.[[25]](#footnote-25)

1. Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial

Prinsip universal dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan atau yang dikenal sebagai *cross border insolvency*.[[26]](#footnote-26)

Prinsip umum mengenai territorial putusan pengadilan suatu negara tersebut, berlaku juga pada putusan pailit oleh pengadilan asing. Putusan pailit suatu pengadilan dari suatu negara tidak dapat diakui dan oleh karenanya tidak akan dapat dieksekusi oleh pengadilan negara lain.[[27]](#footnote-27)

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.[[28]](#footnote-28)

Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.[[29]](#footnote-29)

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan suatu metode yang merupakan suatu cara untuk mencari solusi atau memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyususn, mengklarifikasi, serta menginterpretasikan data-data tersebut.

Penelitian secara ilmiah diharapkan dapat mengungkap kebenaran menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan, yang dpat dikualifikasikan sebagai upaya ilmiah. Dalam memandang suatu penelitian menjadi upaya ilmiah, maka harus dapat dibuktikan kebenarannya. Suatu kebenaran ilmiah dapat tercapai jika dilakukan dengan menggunakan suatu metode yang akan memberikan arah yang cermat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Tesis yang berjudul“Akibat Hukum Pembubaran Perusahaan Pada Perusahaan Pailit dan Perusahaan yang *Going Concern* Pada Kepailitan ” membutuhkan metode penelitian sehingga penelitian dapat berjalan terarah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam Bab Pendahuluan. Metode penelitian di dalam penulisan hukum ini terdiri dari :

1. **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[[30]](#footnote-30) Penulis memilih tipe penilitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur apabila terjadinya sengketa kepailitan pada asuransi.

1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis berdasarkan kaidah ilmiah yang kemudian dianalisis berdasarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Adapun yang dideskripsikan dalam penelitian hukum ini adalah mengenai Perbandingan pembubaran perusahaan dari suatu Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan Perusahaan pailit yang mengalami *going concern* serta akibat hukum terhadap status perusahaan tersebut.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui penelusuran literature/dokumen (studi kepustakaan), dan data yang berasal dari lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan sumber-sumber data.

Ditinjau dari cara memperolehnya, data dibedakan dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Ini berlainan dengan data skeunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.[[31]](#footnote-31)

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dalam Bahan hukum yang digunakan penulis untuk mengkaji isu hukum dalam tesismn ini meliputi beberapa hal berikut, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang –undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[[32]](#footnote-32)Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

* 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Kitab Undang-Undang Hukum dagang
  3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
  6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang
  7. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai PT. Pelita Propertindo Sejahtera dan PT. Megacity Development Corporate
  8. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

1. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri atas buku-buku teks, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, pelaksanaan *Going Concern* dalam kepailitan.

1. **Metode Penyajian Data**

Setelah memilah data dengan cara memilih hal-hal yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam proses pengumpulan data, maka selanjutnya Penulis menyajikan data tersebut yang dimaksudkan untuk memperkuat data-data yang telah diperoleh sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan dan dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.

1. **Teknik Analisi Data**

Untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul, maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian kualitatif adalah suatu proses pengolahan data dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, mengategorikan, dan menguraikannya.[[33]](#footnote-33) Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang kemudian akan disusun secara logis dan sistematis. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

Selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan tersebut disusun dalam karya ilmiah dalam bentuk penelitian hukum (tesis).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penelitian Sebelumnya** | | | | **Penelitian Sekarang** |
| **No** | **Peneliti/Penulis** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Unsur Kebaruan** |
| 1 | Sigit Priyono (2005, UNDIP, Semarang) | Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Pailit | 1. Kepailitan perseroan terbatas adalah juga kepailian bagi direksinya karena implikasi dari adanya kepailitan itu, tetap mengikuti Direksi di luar bidang kegiatan bisnis sehingga membatasi gerak bagi direksi untuk berkarya di bidang lainnya, terutama yang mensyaratakan bahwa seseorang tidak pernah menjadi direksi dari suatu pereroan terbatas yang dinyatakan pailit. 2. Pembubaran perseroan terbatas setelah putusan pailit dibacakan hanya dapat dimintakan penetapan pengadilan oleh kreditur dengan alasan perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. | Peneliti Sigit Priyono Memiliki kesamaan dengan Peneliti ini, karena focus pada Kepailitan Perseroan Terbatas. Kesamaan Lainnya peneliti juga menemukan Akibat Hukum Perseroan Yang dijatuhkan pailit.  Perbedaan diantaranya terletak pada studi kasus dimana peneliti sebelumnya tidak memakai studi kasus sedangkan penelitian ini memankai studi kasus.  Peneliti sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penulis membahas dan mengkaji mengenai:   1. Akibat hukum terhadap pembubaran perusahaan pada perusahaan pailit 2. Akibat hukum terhadap status badan hukum suatu perusahaan yang bubar akibat kepailitan dan perusahaan pailit yang tetap aktif menjalankan perusahaannya (*Going Concern).* |
| 2 | Purbandari  (2014, Mpu Tantular, Jakarta) | Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang Dinyatakan Pailit | 1. Hakekat kepailitan adalah sitaan umum atas harta kekayaan debitor sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, dimana kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama para kreditor berdasarkan prinsip keseimbangan menurut besar kecilnya piutang masing-masing (pari pasu prorate parte), kecuali apabila di antara para berutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 2. Akibat kepailitan suatu PT adalah bahwa PT tidak kehilangan eksistensinya namun pengelolaan dan proses likuidasinya dilakukan oleh kurator. | Peneliti Purbandari, Memiliki kesamaan dengan Peneliti ini, karena focus pada Kepailitan Perseroan Terbatas  Kesamaan Lainnya peneliti juga menemukan Akibat Hukum Perseroan Yang dijatuhkan pailit.  Perbedaan terletak pada penulis sebelumnya tidak membahas proses PT dapat dibubarkan akibat dari kepailitan sedangkan penulisan ini membahas tentang pembubaran PT akibat dari kepailitan.  Perbedaan Lainnya antara peneliti sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penulis membahas dan mengkaji mengenai:   1. Akibat hukum terhadap pembubaran perusahaan pada perusahaan pailit 2. Akibat hukum terhadap status badan hukum suatu perusahaan yang bubar akibat kepailitan dan perusahaan pailit yang tetap aktif menjalankan perusahaannya (*Going Concern).* |

1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan Tesis ini, sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab satu ini akan diuraikan mengeni latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, sistematika penulisan serta metode penelitian yang digunakan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode penyajian data dan teknik analisis data.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang diperoleh dari sumber pustaka. Selain itu juga membahas tentang Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dan kedudukan Kreditor Separatis pada Kepailitan Perseroan Terbatas.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab empat ini Penulis menyajikan informasi hasi penelitian yang telah diolah, dianalisis, ditafsirkan dan diteliti sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik.

Bab IV Simpulan dan Saran

Dalam bab lima ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)**
2. **Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT)**

Pengaturan tentang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia telah ada sejak keluarnya *Wetboek van Koophandel (VwK)* yang di berlakukan di Hindia Belanda pada tanggal1 mei 1848. Kemudian setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, VwK yang di terjemahkan menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD), berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pengaturan tentang PT ini pernah mengalami perubahan sedikit saja, yaiyu perubahan terhadap Pasal 54 KUHD tentang hak suara atas saham, yang dilakukan dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1971 yang mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 1971 dengan Lembaran Berita Negara Nomor 20 Tahun 1971.[[34]](#footnote-34)

Tahun 1995 Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 mengalami perubahan dan diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 3687.

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kompleknya urusan suatu Perseroan Terbatas, maka di buatlah juga peraturan Perundang – Undangan yang lebih lengkap dan sesuai dengan perkembangan yang ada yang mengatur mengenai PT, walaupun Undang – undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 sudah cukup baik, tapi dirasakan masih perlu adanya beberapa perbaikan. Oleh karena itu, Pada tanggal 16 Agustus 2007 telah di berlakukan Undang – Undang baru, yaitu Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.[[35]](#footnote-35)

1. **Pengertian Perseroan Terbatas ( PT )**

KUHD tidak memberikan definisi tentang perseroan terbatas dan KUHD hanyalah mengatur bentuk perseroan ini secara terbatas dan sederhana. KUHD hanya memberikan sedikit gambaran tentang Perseroan Terbatas ( PT ), terutama dari segi penamaan, dan bila ditafsirkan lebih jauh, akan menyentuh persoalan tanggung jawab terbatas dari peseronya ( pemegang saham).

KUHD tidak memberikan pengertiann mengenai Perseroan Terbatas dalam Pasal-Pasalnya. Namun dari Pasal – Pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu PT mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :[[36]](#footnote-36)

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing - masing persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
2. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), merupakan kekuasaan tertinggi pada organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis – garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain – lain.
3. Adanya pengurus ( Direksi ) dan Pengawas ( Komisaris ) yang merupakan suatu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan keputusan RUPS.

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

1. **Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Dalam KUHD tidak satu Pasalpun yang menyatakan Perseroan Terbatas sebagi badan Hukum. Pernyataan Perseroan Terbatas sebagai Bahdan Hukum baru ditemukan dalam rumusan pengertian Perseroan Terbatas yang diatru dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995. Demikian juga, hal yang sama diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Dengan Demikian, sebagi badan Hukum jelas bahwa Perseroan Terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum.[[37]](#footnote-37)

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai Badan Hukum harus terpenuhi syarat sebagai berikut :[[38]](#footnote-38)

1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai Badan hukum memiliki modal dana yang disebutjan dalam Akta Pendirian, yang terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan terbagi atas saham tersebut dimasukka oleh para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota Perseroan.

1. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Pendirian Perseroan bersifat kontraktual, yaitu berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut Undang – Undang pendirinya paling sedikit dua orang atau lebih.

1. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang seterusnya berdasarkan Pasal 18 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu harus dicantumkan dalam AD Perseroan.

1. Pengesahan Pemerintah

Dalam Pasal 7 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

1. **Organ Perseroan Terbatas**

Perseroan terbatas sebagai *artificial person* atau subjek hukum buatan tidak mungkin dapar bertindak sendiri. Kondisi ini berbeda dengan manusia, yang secar alami sudah diberi alat perlengkapan untuk melakukan perbutatan – perbuatan dalam aktivitas hidupnya. Karena perseroan terbatas memiliki kehendak menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuann pendirian perseroan. Orang – orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini dalam undang – undang perseroan terbatas disebut dengan istilah *organ perseroan*.[[39]](#footnote-39)

Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa organ – organ Perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), Direksi, dan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS sebenarnya memiliki kedudukan yang sejajar dan berdampingan dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sering diangap memiliki kedudukan tertinggi dalam Perseroan karena RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada dewan direksi dan komisari.

1. Direksi

Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Hal ini karena direksi yang akan menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas.

Pada Pasal 92 Ayat ( 1 ), Pasal 97 Ayat (1), Pasal 98 Ayat (1) UUPT, Tugas Direksi antara lain :

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dalam Pasal 92 Ayat (1).
2. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1), yang terdapat dalam Pasal 97 Ayat (1).
3. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, dalam Pasal 98 Ayat (1).

Dari ketiga Pasal tersebut, maka tugas utama seorang Direksi adalah melaksanakan pengurusan Perseroan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam dan diluat pengadilan, sehingga maksud dan tujuan Perseroan akan tercapai. Tugas kepengurusan Direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan Direksi juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif, membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan Perseroan untuk masa mendatan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan Perseroan.[[40]](#footnote-40)

1. Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus dan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) dan Pasal 108 Ayat (1) UUPT.

Dalam Pasal 108 Ayat (1) dan (2) UUPT 2007, Tugas dari dewan komisaris diantaranya adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi dan jalannya pengurusan pada umumnya.
2. Melakukan pengawasan terhadap audit keuangan
3. Melakukan Pengawasan atas organisasi Perseroan
4. Melakukan pengawasan terhadap personalia
5. Memberi Nasihat kepada Direksi.
6. **Tinjauan Umum MengenaiPembubaran Perseroan Terbatas**

**Pengertian Pembubaran Perseroan Terbatas**

Pembubaran Perseroan Terbatas (*widing up)* adalah merupakan suat langkah hukum yang diambilmterhadap suatu badan hukum perseroan terbatas atas alasan – alasan hukum tertentu, antara lain, jangka waktu berdiri dari perseroan tersebut telah berakhir ataupun alasan – alasan hukum ataupun alasan komersial yang mengharuskan badan hukum tersebut dibubarkan, baik melalui RUPS dan atau melibatkan peran pengadilan negeri dimana kemudian untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta badan hukum dalam likuidasi tersebut diangkat likuidator yang bertanggung jawab kepada RUPS ataupun otoritas yang menaungi usaha yang dijalankan oleh badan hukum tersebut.[[41]](#footnote-41)

Menurut Munir Fuady Pembubaran Perusahaan adalah suatu tindakan yang menyebabkan perusahaan berhenti eksistensinya dan tak lagi menjalankan bisnis untuk selama – lamanya, diikuti dengan proses administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Bubarnya perusahaan ini baik dengan proses likuidasi secara keseluruhan ( dengan dilakukan pemberesan) ataupun dengan Proses likuidasi tanpa pemberesan sama sekali.[[42]](#footnote-42)

Pengertian Pembubaran Perseroan Menurut Hukum sesuai dengan Pasal 143 Ayat (1) adalah :[[43]](#footnote-43)

1. Penghentian Kegiatan Perusahaan
2. Namun Penghentian kegiatan usaha itu tidak mengakibatkan status hukum “hilang”
3. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesai likuidasi, dan pertanggungjawaban dari likuidator sampai proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

**Dasar Terjadinya Pembubaran Perseroan**

Pada Pasal 142 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang Pembubaran Perseroan terjadi :

1. Berdasarkan Keputusan RUPS.
2. Karena Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggara dasar telah berakhir.
3. Berdasarkan Penetapan Pengadilan.
4. Dengan dicabutnya Kepailitan berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
5. Karena harta pailit yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau,
6. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dari dasar terjadinya pembubaran perseroan diatas maka akan dijelaskan beberapa proses pembubaran yang diatur dalam undang – undang tersebut.

1. Proses Pembubaran Berdasarkan Keputusan RUPS

Tata cara pembubaran Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS diatur pada Pasal 144 Undang – Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 melalui proses berikut :[[44]](#footnote-44)

1. Yang berhak mengajukan usulan pembubaran

Yang berhak mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS menurut Pasal 144 Ayat (1), terdiri atas :

1. Direksi

Direksi dapat mengajukan usul pembubaran. Bukan angota Direksi, tetapi Direksi dalam Pengertian Dewan Direksi (*Board of Directors*). Anggota Direksi secara sendirian tidak berhak mengajukan usul pembubaran, tetapi harus berdasarkan Keputusan Rapat Direksi.

1. Dewan Komisaris (DK)

DK dalam hal ini pun, yang berhak mengajukan usul harus DK secara majelis berdasarkan keputusan rapat DK. Anggota DK secara individual, tidak berhak mengusulkan pembubaran Perseroan kepada RUPS sesuai dengan Pasal 108 Ayat (4) Undang-undang PT.

1. Pemegang Saham

Yang ketiga, yang berhak mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS adalah pemegang saham :

* Boleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih,
* Dengan syarat, mereka mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

1. Syarat sahnya keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan

Berdasarkan usul pembubaran Perseroan yang diajukan baik oleh pemegang saham, Direksi atau DK :

1. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS. (Pasal 79 Ayat (1))
2. Direksi melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 14 (emapat belas) hari sebelum tanggal RUPS diselenggarakan. (Pasal 82 Ayat (1))
3. Pemanggilan dilakukan dengan Surat Tercatat atau dalam Surat Kabar dengan menyebut mata aacar rapat disertai pemberitahuan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan. (Pasal 82 Ayat (3))

Demikian dengan ringkas syarat pemanggilan yang harus dipenuhi agar pemanggilan itu sah menurut hukum.

Selanjutnya, agar keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah menurtu hukum, apabila keputusan diambil sesuai dengan ketentus 144 ayat (12). Oleh karena itu agar keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah, harus terpenuhi syarat berikut :

1. Syarat kuorum kehadiran paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS.
2. Syarat sahnya keputusan RUPS, apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

Akan tetapi seperti yang dikatakan Pasal 144 Ayat (2), pengambilan keputusan RUPS harus juga sesuai dengan Pasal 87 ayat (1). Berarti sebelum dilakukan voting berdasarkan Pasal 89 Ayat (1), harus lebih dahulu diupayakan pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan persetujuan pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal ini perlu diingatkan, kemungkinan mengadakan RUPS kedua apabila RUPS pertama gagal mencapai kuorum sesuai Pasal 89 Ayat (3), maupun RUPS ketiga berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga, jika RUPS kedua gagal mencapai kuorum, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4).

1. Pembubaran mulai berlaku

Pembubaran Perseroan mulai proses RUPS mulai berlaku atau efektif menurut Pasal 144 ayat (3), terhitung sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan.

Sekiranya keputusan RUPS tidak menetapkan saat mulainya pembubaran, dapat dikonstruksi mulainya berlaku pada tanggal keputusan RUPS dibuat.

1. Proses Pembubaran bubaran Perseroan Berdasarkan Jangka Waktu Berdirinya Berakhir.[[45]](#footnote-45)

Sudah dijelaskan, salah satu cara pembubaran Perseroan yang dibenarkan Undang-undang ini, karena “jangka waktu berdirinya” yang ditetapkan dala AD telah “berakhir”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6, undang-undang ini, AD dapat menentukan jangka waktu berdirinya berdasarkan alternative berikut :

* Boleh didirikan untuk jangka waktu terbatas, misalnya 30 (tiga puluh) atau 75 (tujuh puluh lima) tahun, atau
* Bisa juga ditetapkan dalam AD jangka waktu berdirinya tanpa terbatas

Apabila AD memilih alternative pertama, dimana Perseroan didirikan untuk jangka waktu tertentu, maka proses pembubarannya menurut Pasal 145 adalah sebagai berikut :

1. Perseroan karena hukum (van rechtswege, ipso jure) bubar dengan sendirinya, sejak waktu berdirinya berakhir

Hal itu ditegaskan pada Pasal 145 Ayat (1), bahwa Perseroan karena hukum bubar apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam AD telah berakhir.

Kecuali sebelum jangka waktu berdirinya berakhir, diajukan permohonan perpanjangan dengan jalan melakukan perubahan AD sesuai tata cara yang ditentukan.

1. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, RUPS menetapkan likuidator

Proses selanjutnya Pembubaran Perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir :

1. Harus diadakan RUPS untuk menetapkan pertunjukan “likuidator”
2. Jangka waktu mengadakan RUPS tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.
3. Direksi dilarang melakukan perbuatan hukum

Terhitung sejak tanggal jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir, Direksi tidak boleh atau dilarang melakukan perbuatan hukum.

Meskipun penjelasan Pasal 142 ayat (6) mengatakan pembubaran dan pengangkatan likuidator tidak berarti anggota Direksi dan DK memiliki diberhentikan, namun menurut Pasal 145 ayat (3), mereka tidak memiliki kapasitas dan kewenangan melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling, legal act). Semua perbuatan hukum dalam rangka pemberesan likuidasi, beralih seluruhnya kepada likuiditor.

1. Proses Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri[[46]](#footnote-46)

Cara lain pembubaran Perseroan yang diatur pada Pasal 142 Ayat (1) adalah berdasar Penetapan Pengadilan Negeri (PN). Proses Pembubarannya diatur lebih lanjut pada Pasal 146, seperti yang dijelaskan dibawah ini.

1. Penetapan pembubaran menjadi kompetensi absolut PN

Yuridiksi memeriksa dan menerbitkan Penetapan pembubaran Perseroan, jatuh menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum dalam hal ini PN, bukan kompetensi Pengadilan Niaga. Sedang kompetensi relatifnya jatuh menjadi yuridiksi PN di tempat mana Perseroan berkedudukan.

1. Yang berhak mengajukan permohonan

Pembubaran Perseroan berdasar Penetapan PN, disebabkan adanya pengajuan permohonan oleh orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk itu. Berarti supaya permohonan pembubaran Perseroan ke PN memenuhi syarat, harus diajukan oleh orang atau pihak yang memiliki *legal standing (ligitima person standi in judicio)* untuk itu.

Siapa-siapa atau pihak mana saja yang memiliki kapasitas atas kedudukan (*hoedamigheid, quality or capacity*) mengajukan permohonan pembubaran ke PN, telah ditentukan secara limitative dan enumerative pada Pasal 146 ayat (1), yang terdiri dari

1. Kejaksaan

Undang-undang memberi *legal standing* atau *legitima* *persona standi in judicio* kepada Kejaksaan mengajukan Permohonan pembubaran Perseroan ke PN atas alasan :

* Perseroan melanggar kepentingan umum, atau
* Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan

1. Pihak yang berkepentingan

Undang-undang ini tidak menentukan secar spesifik siapa atau pihak mana saja yang digolongkan pihak yang berkepentingan. Akan tetapi jika hak itu dikaitkan dengan alasan permohonan pembubaran yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan hanya terbatas berdasarkan Akta Pendirian. Kedalamnya, tidak termasuk Kejaksaan, karena kepadanya telah ditentukan dengan tegas porsi alasan yang sah baginya mengajukan Permohonan pembubaran Perseroan.

1. Pemegang saham, direksi atau DK

Selain kejaksaan dan pihak yang berkepentingan Pasal 146 ayat (1) huruf c, memberi kapasitas *legal standing* juga kepada :

* Pemegang Saham
* Direksi
* Dewan Komisaris

Mereka berhak untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan Negeri. Dasar alasan permohonan yang dapat mereka ajukan, hanya terbatas pada alasan “Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”

1. Penetapan Pengadilan Negeri/Niaga (PN) menunjuk likuidator

Hal lain yang diatur megenai pembubaran Perseroan berdasar Penetapan PN adalah penunjukan likuidator. Menurut Pasal 146 ayat (2), dalam Penetapan PN yang mengabulkan permohonan pembubaran Perseroan, harus juga menetapkan “penunjukan” likuidator. Penetapan PN yang lalai menetapkan penunjukan likuidator, mengakibatkan penetapan itu tidak dapat dijalankan, karena tidak ada likuidator yang akan bertindak melakukan pemberesan.

1. Proses Pembubaran Karena Harta Pailit Perseroan Tidak Cukup untuk Membayar Biaya Kepailitan[[47]](#footnote-47)

Lengkapnya Pasal 142 ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai beriku:

“Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.”

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, cara pembubaran yang diatur di dalamnya, berkaitan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UU KPKPU)

Menurut Pasal 17 ayat (2) UU KPKPU, Majelis Hakim, yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Selanjutnya Penjelasan pasal ini memberi pedoman kepada Majelis Hakim yang memutus perkara kepailitan, supaya biaya kepailitan ditetapkan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas.

Biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator menurut Pasal 17 Ayat (3) UU KPKPU, dibebankan kepada “pihak pemohon” pernyataan pailit (*voluntair petition*) atau kepada pemohon pailit (*involuntair petition*) dan Debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut. Dan untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Eksekusi atas permohonan Kurator.

Menurut Pasal 142 Ayat (1) huruf d, terjadi pembubaran Perseroan. Serta menurut Pasa l42 ayat (3), RUPS harus menunjuk likuidator, dan apabila RUPS tidak menunjuknya, dengan sendirinya menurut hukum Direksi bertindak sebagai likuidator.

1. Proses Pembubaran Karena Harta Pailit yang Telah dinyarakan Pailit Dalam Keadaan Insolvensi.[[48]](#footnote-48)

Ketentuan Pasal 142 Ayat (1) huruf e selengkapnya berbunyi, pembubaran Perserian terjadi :

“ Karena Harta Pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang”

Proses cara pembubaran karena harta pailit Perseroan berada dalam keadaan insolvensi, berkaitan dengan ketentuan Pasal 187 UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.

Menurut pasal ini, setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu Rapat Kreditor pada hari, jam dan tempat yang ditentukan. Tujuan rapat, untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit, dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang yang dimasukka setelah berakhir tenggang waktu. Berdasar Pasal 113 ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan :

1. Batas akhir pengajuan tagihan
2. Batas akhir verifikasi pajak
3. Hari, tanggal, waktu, dan tempat Rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Apabila ada lagi yang mengajukan tagihan setelah melampaui waktu yang ditentukan dalam penetapan Hakim Pengawas, maka menurut Pasal 187 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 KPKPU, masih dapat dilakukan pencocokan dalam Rapat Kreditor mengenai cara pemberesan harta pailit yang diadakan oleh Hakim Pengawas.

Jika ketentuan ini dikaitkan dengan cara terjadinya pembubaran yang disebut Pasal 142 Ayat (1) huruf e UUPT 2007, setelah dijatuhkan putusan pernyataan pailit, harta pailit berada dalam keadaan insolvensi atau dalam keadaan pailit (*staat van faillissement, state of bankruptcy*).

Dalam keadaan yang demikian menurut Pasal 187 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, Hakim Pengawas mengadakan Rapat Kreditor untuk membicarakan cara pemberesan harta pailit.

Bertitik tolak dari ketentuan yang dikatakan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) huruf e, terhitung sejak Perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Perseroan telah berada dalam keadaan “insolvensi” (*staat van faillissement, state os bankruptcy*). Berarti sejak saat itu terjadi pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasa l142 ayat (1) huruf e UUPT 2007. Oleh karena itu, RUPS menunjuk likuidator untuk melakukan likuidasi.

1. Proses Pembubaran Karena Izini Usaha Dicabut[[49]](#footnote-49)

Cara terjadinya Pembubaran Perseroan yang lain, diatur pada Pasal 142 ayat (1) huruf f yang berbunyi :

“Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan pasal ini mengatakan yang dimaksud dengan “dicabutnya usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi”, adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahnaya dicabut, misalnya izin usaha perbankan atau izin usaha perasuransian dicabut. Berarti tidak mungkin lagi berusaha dalam bidang lain, misalnya perdagangan atau kontraktor.

Terjadinya pembubaran perseroan jika izin usahnya dicabut, bersifat imperatif, yakni Perseroan “wajib” melakukan likuidasi. Memang sifat imperatifnya digantungkan pada syarat, apabila pencabutan izin itu, mengakibatkan Perseroan tidak mungkin lafi berusaha dalam bidang lain. Oleh karena itu, kalau izin usaha Perseroan yang bersangkutan meliputi berbagai bidang usaha dan salah satu diantaranya dicabut, tidak terjadi pembubaran Perseroan.

**Pembubaran Wajib Diikuti dengan Likuiasi**

Apabila terjadi pembubaran Perseroan berdasar keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam AD telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, pembubaran itu wajib diikuti dengan “likuidasi”. Yang melakukan likuidasi dalam pembubaran yang disebut di atas adalah “likuidator”.

Likuidasi (*vereffening, winding-up*) mengandung arti pemberesan penyelesaian dan pengakhiran urusan Perseroan setelah adanya keputusan apakah itu berdasar keputusan RUPS atau berdasar Penetapan Pengadilan yang menghentikan atau membubarkan Perseroan. Dan selama penyelesaian pembubaran atau pemberesan berjalan, perseroan itu berstatus perseroan “dalam penyelesaian” yang oleh Pasal 143 Ayat (2) disebut Perseroan “dalam likuidasi”. Kalimat atau kata “dalam likuidasi: harus dicantumkan dibelakang nama Perseroan pada setiap surat keluar Perseroan.

Adapun yang dimaksud dengan likuidator (*liquidateur,liquidator*), adalah ornag yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likudasi. Kepadnaya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel Perseroan.

Jika pembubaran terjadi berdasarkan karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, yang bertindak melakukan likuidasi adalah Kurator. Hal itu ditegaskan pada Penjelasan Pasal 142 Ayat (2) huruf a yang mengatakan, yang dimaksud dengan likuidasi yang dilakukan oleh Kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasar karena harta Perseroan yang telah dinyatakan pailit, berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 142 ayat (1) huruf e).

Mengenai siapa yang menunjuk atau mengangkat likuidator :

1. RUPS

Apabila pembubaran erseroan terjadi karena keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar putusan Pengadilan Niaga maka yang berwenang mengangkat likuidator adalah RUPS.

Dalam hal ini, jika RUPS tidak menunjuk atau mengangkat likuidator, direksi yang bertindak selaku likuidator.

Khusus untuk pengangkatan likuidator berdasar pembubaran Perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir, Pasa l45 ayat (2) menentukan jangka waktu menetapkan penunjukan likuidator. Harus ditunjuk oleh RUPS, dalam jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.

1. Pengadilan Negeri yang bertindak mengangkat likuidator

Apabila pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, Penunjukan / Pengangkatan likuidator dilakukan oleh Pengadilan dengan cara dicantumkan dalam Penetapan tersebut.

**Perseroan Tidak Dapat Melakukan Perbuatan Hukum**

Terhitung sejak tanggal pembubaran, Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali jika diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Apabila larangan ini dilanggar oleh Perseroan, anggota Direksi, anggota DK dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Seperti yang telah pernah disinggu, meskipun menurut Pasal 143 Ayat (1) pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum selama proses likuidasi atau pemberesan berlangsung, menurut Pasal 142 Ayat (2) huruf b, Perseroan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum. Pelanggaran anggota Direksi atau anggota DK terhadap larangan itu, diancam dengan memilkukan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan itu.

**Semua Ketentuan yang belaku terhadap Direksi, *Mutatis Mutandis* berlaku bagi Likuidator**

Pasal 142 ayat (6) menegaskan, ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, wewenang kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi, *mutatis mutandis* berlaku terhadap likuidator. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengangkatan oleh RUPS

Mengenai pengangkatan likuidator berdasar pembubaran yang terjadi karena keputusan RUPS, karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau karena dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri :

* *Mutatis mutandis* berlaku Pasal 94 Ayat (1)
* Dengan demikian, pengangkatan likuidator dilakukan oleh RUPS.

Kecuali apabila pembubaran terjadi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, yang mengankat likuidator adalah Pengadilan itu sendiri yang ditetapkan dalam Penetapan tersebut.

1. Pemberhentian Likuidator oleh RUPS

Oleh karena pemberhentian anggota Direksi *Mutasi Mutandis* berlaku bagi likuidator, maka pemberhentian likuidator merujuk kepada ketentuan Pasal 105, yang berarti :

* Likuidator dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS, dengan menyebutkan alasannya,
* Keputusan pemberhentian diambil RUPS setelah likuidator yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS

Atau pemegang saham dapat juga memberhentikan likuidator yang dilakukan melalui keputusan di luar RUPS secara fisik, dalam bentuk *circular resolution* sesuai ketentuan Pasal 91, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul pemberhentian likuidator yang bersangkutan.

Sudah barang tentu, dalam hal inipun sebelum keputusan pemberhentian likuidator melalui sistem *circular resolution*, harus terlebih dahulu dipenuhi syarat berikut :

* Likuidator diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian itu, dan
* Memberi kesempatan kepadanya untuk membela diri secara tertulis sebelum diambil keputusan pemberhentian melalui circular resolution tersebut.

1. Pemberhentian Sementara Likuidator, Dilakukan DK

Sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (6) ketentuan pemberhentian sementara anggota Direksi, *Mutatis mutandis* berlaku juga bagi likuidator. Dengan demikian, pemberhentian sementara likuidator merujuk kepada ketentuan Pasal 106. Berarti secara analog atau *mutatis mutandis* pasal ini memberi wewenang kepada DK untuk memberhentikan sementara likuidator dengan menyebut alasannya, sesuai tata cara berikut:

* DK menyampaikan pemberhentian sementara tersebut kepada likuidator yang bersangkutan ”secara tertulis”, dan sejak pemberitahuan itu, likuidator tidak berwenang lagi melakukan tugas likuidasi.
* Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, harus diselenggarakan RUPS dengan mata acara pemberhentian semetara itu;
* Dalam RUPS tersebut, likuidator yang bersangkutan diberi keseoakatan untuk membela diri;
* RUPS dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang diambil DK.

1. **Tinjauan Umum Tentang Kepailitan**
   1. **Dasar Hukum Kepailitan**

Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia adalah sebagai berikut :[[50]](#footnote-50)

Undang – undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (*Faillissement Verordering* Stb.1905 No 217 *jo* Stb.1906 No. 348. dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Kepailitan menjadi Undang – Undang, LN.RI.No.3778, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – undang Hukum Pidana ( Pada Pasal 306, Pasal 297, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 400, Pasal 520).

Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

* 1. **Pengertian Kepailitan**

1. **Menurut Kamus**

Kepailitan di dalam bahasa Perancis yaitu istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar untungnya di dalam Bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet*. Untuk arti sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet.* Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*”, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah “*faillire*”. Pailit di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor (yang berhutang) yang berhenti membayar utang-utangnya.[[51]](#footnote-51)

Di Negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.[[52]](#footnote-52) Mengenain definisi dari kepailitan itu sebagaimana terjemahan istilah Belanda “*Faillisement*” tidak dapat kita temukan dalam peraturan kepailitan (*Faillisement Verordenings* yang diundangkan dalam *Staatsblad* Hindia Belanda tahun 1903 No. 207 juncto *Staarsblad* tahun 1906 No. 348).[[53]](#footnote-53)

Pengertian pailit yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary sendiri dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari Debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata dilakukan secara suka rela oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitor). Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas “*publisitas*” dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan Pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan maupun yang menolak permohonan kepailitan tersebut.[[54]](#footnote-54)

1. **Pendapat Para Sarjana**

Beberapa definisi dan pengertian kepailitan menurut para sarjana :

1. Abdurrachman

Bangkrut / pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.[[55]](#footnote-55)

1. Subekti dan R. Tjitrosoedibio

Pailit adalah keadaan dimana seseorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi kreditor.[[56]](#footnote-56)

1. Adrian Sutedi

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang).[[57]](#footnote-57)

1. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Manyatakan bahwa kepailitan adalah suatu *beslah executorial* yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitor.[[58]](#footnote-58)

1. Kartono

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor untuk kepentingan seluruh kr nya bersama-sama, yang pada waktu si debitu dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.[[59]](#footnote-59)

1. Munir Fuady

Pailit atau bengkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.[[60]](#footnote-60)

1. R. Soekardono

Kepailitan adalah penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihannya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang bertugas dengan pemeliharaan serta pemberesan budel dari orang yang pailit.[[61]](#footnote-61)

1. Subekti

Dalam bukunya *Pokok - Pokok Hukum Perdata* berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua piutang secara adil.[[62]](#footnote-62)

1. Zainal Asikin

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahua hukum diartikan sebagai keadaan debitor (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya.[[63]](#footnote-63)

1. **Menurut Undang-Undang Kepailitan**

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemenuhannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas.

Pernyataan Pailit terhadap debitor yang dinyatakan pailit tersebut di proses dalam Pengadilan yaitu dengan pemeriksaan yang akurat. Dan segala sesuatu yang bersangkutan tentang peristiwa pailit tersebut disebut dengan istilah “*Kepailitan”*.[[64]](#footnote-64)

* 1. **Tujuan Kepailitan**

Tujuan Kepailitan pada dasarnya untuk memberikan solusi terhadap pada pihak yang bersengketa apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang – utangnya. Sehingga dengan adanya kepailitan untuk menghindari dan mencegah tindakan – tindakan yang dilakukan debitor yang dapat merugikan para kreditornya.

Menurut Sutan Remi Sjadeni tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing – masing.[[65]](#footnote-65)

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini juga di sebutkan dalam penjelasan umum Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 :

1. Untuk menghidari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Untuk menghindari adanya Kreditor yang pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atay Debitor sendiri.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, tujuan – tujuan dari hukum Kepailitan adalah :[[66]](#footnote-66)

Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan – tagihannya terhadap Debitor. Hukum Kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para kreditor terhadap harta Debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang – Undang Kepailitan, maka akan terjadi Kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.

Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan Debitor kepada Kreditor konkuren atau *unsecured creditors*  berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing – masing Kreditor tersebut.

Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan Kreditor. Dengan dinyatakan seorang Debitor pailit, maka Debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaan, dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan Debitor menjadi harta pailit.

1. **Syarat – Syarat Kepailitan**

Syarat pengajuan permohonan Pailit terhadap debitor terdapat pada Pasal 2 Ayat ( 1 ) Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UUK-PKPU), yaitu :

“ Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitpun satu utang yan telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Memperhatikan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah :[[67]](#footnote-67)

* 1. Terdapat minimal 2 orang kreditor
  2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang
  3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih

1. Terdapat minimal 2 orang kreditor atau lebih ( Concursus Creditorum)

Syarat bahwa harus adany dua kredito atau lebih sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang – utang Debitor kepada Kreditor – kreditornya dapat dilakukan secara seimbang dan adit. Setiap Kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan Debitor.[[68]](#footnote-68)

1. Syarat harus adanya utang

Pada proses kepailitan istilah utang merupakan hal yang sangat penting, khususnya substansi utang ini yang menjadi dasar tagihan dari para kreditor kepada debitornya. Tanpa adanya utang maka esensi kepailitan menjadi tidak ada, karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuditas asset debitor untuk membayar utang – utangnya terhadap para kreditor.[[69]](#footnote-69)

Undang – Undang No. 4 Tahun 1998 tidak memberikan definidi sama sekali mengenai utang, oleh karena itu, telha menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda – beda (baik secara sempit maupun luas).[[70]](#footnote-70)

Pengetian mengenai utang sendiri telah dijabarkan di dalam Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 pada Pasal 1 Angka 6 :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baiik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjrn, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib di penuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannnya dari harta kekayaan debitor”.

Dari definisi utang yang dirumuskan oleh UUK dan PKPU dapat dirumuskan secara luas, tidak hanya meliputi utnag – piutang atau perjanjian pinjam – meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena perjanjian atau undang – undang yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.[[71]](#footnote-71)

Secara normatif, makna utang disini sangat luas. Utang yang terjadi bukan hanya karena perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit saja, tetapi juga kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian lainnya, antara lain seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjuan jual beli, perjanjian pemborongan, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa-beli dan lain-lain. Demikian juga halnya kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena undang-undang adalah utang. Misalnya pajak yang belum dibayar kepada negara adalah utang. Selain itu, kewajiban membayar uang berdasarkan putusan pengadilan termasuk putusan badan arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk juga utang.[[72]](#footnote-72)

1. Syarat utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Utang yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU adalah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dimana kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu dikarenakan baik telah diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun oleh putusan pengadilan, majelis arbitrase, atau arbiter. Berkaitan dengan hal ini, di dalam UUK-PKPU tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.[[73]](#footnote-73)

Terkait dengan syarat utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebenarnya kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda pengertian dan kejadian. Dimana utang telah jatuh waktu adalah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan oleh karena itu maka kreditor berhak untuk menagih utangnya. Namun demikian, dapat terjadi kondisi dimana sekalipun utang belum jatuh waktu, namun utang tersebut dapat ditagih karena terjadi salah satu peristiwa yang disebut *events of default* atua cidera janji.[[74]](#footnote-74)

1. **Pihak – Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit**

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU pihak – pihak yang dapat mengajukan pailit adalah :

* 1. Debitor sendiri

Undang – undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya ( Pasal 4 Ayat (1) UUK-PKPU ).[[75]](#footnote-75)

* 1. Seorang atau lebih kreditor

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor preferen, kreditor konkuren, dan kreditor separatis sesuai dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU.

* 1. Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU permohonan pailit dapat diajukan juga oleh kejaksaan demi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :[[76]](#footnote-76)

1. Debitor melarikan diri
2. Debitor menggelapkan sebagian dari harta kekayaan
3. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
4. Debitor mempunyai utang yang bersal dari menghimpunan dana dan masyarakat lain
5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu
6. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
   1. Bank Indonesia

Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.[[77]](#footnote-77)

Definisi bank menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 pada Pasal 1 butir 2 yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka mengingkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

* 1. Bapepam

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UUK – PKPI memberikan kewenanangan kepada Bapepam untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bursa efek, perusahaan, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Bapepam berwenang penuh untuk mengajukan permohonan pailit terhadap instansi – instansi yang berada dibawah pengawasannya.

* 1. Menteri Keuangan

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) UUK – PKPU yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan public adalah Menteri Keuangan.

Pada saat ini dengan adanya Undang – Undang baru mengenai Otoritas Jasa Keuangan apabila yang diajukan pailit debitornya adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.maka yang berhak mengajukan pemohonan pailit adalah Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini merujuk pada asas lex priori derogat lex posteriorio dimana hukum baru mengeyampingkan hukum yang lama.

1. **Mekanisme Pengajuan Permohonan Pailit**
   1. Tahap Pendaftaran Permohonn Pernyataan Pailit

Pemohon pailit mengajukan permohonana pernyataan Pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga, setelah diajukannya permohonan pernyataan Pailit oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Niaga maka Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut dan Pemohon mendapatkan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Dalam Pasal 7 UUK – PKPU Permohonan pernyataan pailit baik yang diajukan oleh debitor sendiri maupun kreditor tidak dapat diajukan sendiri oleh kreditor maupun debitor, melainkan harus melalui advokat. Hal ini mendapatkan pengecualian apabila Permohonan Pernyataan Pailit tersebut merupakan wewenang dari Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan, yang saat ini wewenang dari Bank Indonesia dan Bapepam telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Pasal 3 UUK – PKPU, Permohonan Pernyataan Pailit diajukan ke Pengadilan Niaga dengan ketentuan :

1. Jika debitor diketahui domisilinya maka permohonan pernyataan pailit diajukan ditempat kedudukan hukum debitor ( Pasal 3 Ayat (1) UUK – PKPU ).
2. Jika debitor meninggalkan wilayah Kesatuan Republik Indonesia, maka permohoana pernyataan pailit diajukan ditempat kedudukan terakhir debitor. ( Pasal 3 Ayat (2) UUK – PKPU ).
3. Jika debitor adalah sebuah firma, maka permohoanan pernyataan pailit diajukan ditempat kedudukan hukum firma. ( Pasal 3 Ayat (3) UUK – PKPU ).
4. Jika debitor berdomisis di luar negeri, maka permohonan pernyataan pailit diajukan di tempat kedudukan hukum usaha atau pekerjaannya di Indonesia. ( Pasal 3 Ayat (4) UUK – PKPU ).
5. Jika debitor adalah badan hukum, maka permohonana pailit diajukan di tempat kedudukan hukum badan hukum sesuai dengan yang ditentukan dalam anggaran dasar. ( Pasal 3 Ayat (5) UUK – PKPU).
   1. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Sebelum persidangan dimulai pengadilan memulai juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain :[[78]](#footnote-78)

Wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan.

Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor (*voluntary petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK – PKPU telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum siding pemeriksaan pertama.

* 1. Tahap Persidangan atas Permohonan Persyaratan Pailit

Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) UUK – PKPU bahwa dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan siding.

Dalam hal sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan di Pengadilan hal ini berdasarkan Pasal 6 Ayat (6) UUK – PKPU. Dalam Pasal 7 Ayat (7) UUK – PKPU, atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, maka Pengadilan dapat menunda siding pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 ( dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Niaga.

* 1. Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 9 UUK – PKPU bahwa Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pailit diucapkan.

1. **Akibat Kepailitan**

Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru. Putusan Hakim tentang kepailitan mendukung tiga hal yang esensial yaitu :[[79]](#footnote-79)

* 1. Pernyataan bahwa si debitor pailit
  2. Pengangkatan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan, dan
  3. Kurator.

Secara Umum akibat penyataan pailit adalah sebagai berikut :[[80]](#footnote-80)

Kekayaan debitor pailit yang masuk harta Pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 19 Fv, harta pailit meliputi seluruh kekayaan Debitor pada waktu putsan pailit diucapkan serta segala apa yang diperoleh Debitor Pailit selama kepailitan. Barang – barang yang tidak termasuk harta pailit diatur dalam Pasal 20 Fv. Misalnya : perlengkapan tidur, persediaan makanan selama 1 bulan dll., barang yang sangat pribadi milik Debitor Pailit.

Kepailitan semata – mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi Debitor Pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.

Debitor pailit denu hukum kehilangan hak untuk megurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan ( Pasal 22 Fv ).

Segala perikatab Debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit ( Pasal 23 Fv )

Harta pailit diurus dab dikuasai Kurator untuk kepentingan semua para Kreditor dan Debitor dan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaa jalannya Kepailitan.

Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator ( Pasal 24 Ayat (1) Fv ).

Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta Debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan ( Pasal 25 Fv ).

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56A, Kreditor yang dijamin dengan Hak Gada, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan atau Hipotek dapat melaksanakan hak angunannya seolah-olah tidak ada kepailitan ( Pasal 56 Ayat (1) UUK ).

Pihak Kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan Debitor hingga dibayar tagihan Kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailiy ( Pasal 59 Fv ).

Hak Eksekutif Kreditor yang dijamin sebaagaimana disebut dalam Pasal 56 Ayat (1) UUK, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditanggugkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan ( Pasal 56A Ayat (1) UUK ).

Dengan Pailitnya pihak debitor, banyak akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh Undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kapada debitor dengan 2 (dua) model pemberlakuan yaitu:[[81]](#footnote-81)

1. Berlaku Demi Hukum

Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum *(by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.

1. Berlaku secara *rule of season*

Selain akibat yuridis hukum kepailitan yang berlaku demi hukum, terdapat akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara *rule of reason*. Maksud dari pemberlakuan model ini adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.

Beberapa Akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan debitur :

1. Akibat Kepailitan terhadap Debitor Pilit dan Hartanya

Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor, dimana debitor tidaklah berada dibawah pengampuan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta bedan yang akan diperlohnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailitnya.[[82]](#footnote-82)

Debitor yang dinyatakan pailit, berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUK – PKPU kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus karena sudah beralih kepada kurator ( Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya ). Harta benda termasuk dalam keapailitan adalah seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapakan serta segala sesuatu yang di peroleh selama kepailitan.[[83]](#footnote-83)

Dalam Ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 24 UU KPKPU tidak berlaku pada :

* + 1. Benda, termasuk hewan yang benar – benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat – alat medis yang di pergunakan untuk kasehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakana oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 ( tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu.
    2. Segala sesuatu yang di peroleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, atau
    3. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban member nafkah menurut undang – undang.

1. Akibat Kepailitan terhadap Penyitaan

Putusan kepailitan menyebabkan penyitaan-penyitaan dan upaya-upaya hukum atas penyitaan itu akan gugutr ( tidak mempunyai kekuatan lagi ), karena dengan adanya putusan kepailitan, panyitaan-penyitaan akan berlaih menjadi penyitaan kepailitan umum yang pelaksanaannya akan di tangani oleh Balai harta Peninggalan (BHP).[[84]](#footnote-84)

1. Akibat Kepailitan terhadap Perjanjian Timbal Balik Yang Dilakukan Sebelum Kepailitan

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian dalam jangka waktu yang disepakati oleh curator dan pihak tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Ayat (1) UUK – PKPU.

Apabila Kesepakatan mengenai jangka waktu tidak tercapai, maka berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) UU KPKPU, Hakim Pengawas yang berwenang menetapkan jangka waktu tersebut. Perjanjian dapat berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlukan sebagi kreditot konkuren apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) fan Ayat (2) kurator tidak memberi jawaban atau tidak melanjutkan pelaksanaan perjanjian.[[85]](#footnote-85)

1. Akibat terhadap penetapan pelaksanaan pengadilan

Dalam Pasal 31 Ayat (1) UU KPKPU dikatakan bahwa putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga denga nmenyandera debitor.

1. Akibat Hukum terhadap Kreditor

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budel pailitnya sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memenang hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UUK dan PKPU dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya, kreditor dapat dikelompokkan sebagai berikut:[[86]](#footnote-86)

1. Kreditor Separatis

Kreditor Separatis merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, sehingga hak-hak eksekusi kreditor separatis ini tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.\

1. Kreditor Preferen

Kreditor Preferen merupakan kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit.

1. Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren/bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor.

1. Akibat terhadap penahanan Debitor

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (3) UU KPKPU bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

1. Akibat terhadap kewajiban pembayaran uang paksa

Dalam Pasal 32 UU KPKPU yang menyatakan bahwa Selama keapilitan Debitor tidak dikenakan uang paksa, dalam penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa uang paksa dalam ketentuan Pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

1. **Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

Berdasarkan Pasal 16 UU KPKPU Dalam hal sejak tanggal putusan pailit diucapakan maka yang berhak melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit ialah kurator meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi ataupun Peninjauan Kembali. Apabila putusan pernyataan Pailit dibatalkan yang merupakan akibat adanya kasasi dan peninjauan kembali maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan pembatalan putusan pailit, maka segala perbuatan yang dilakukan kurator tetap sah dan mengikat kurator.

1. Pengurusan Harta Pailit

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pilit, pencatatan/pendaftaran harta pilit, mengalihkan harta pailit, melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

1. Pemberesan Harta Pailit

Pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta debitor pailit. Dalam Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) UUK dan PKPU dijelaskan bahwa yang dimaksud pemberesan asalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

1. **Tinjauan Umum Mengenai *Going Concern***
2. **Pengertian Melanjutkan Usaha (*Going Concern*)**

Keberlajutan Usaha atau *Going Concern* merupakan asumsi akuntansi yang mengharapkan sebuah usaha dapat berlanjut terus dala mwaktu yang tak terbatas, yang juga disebut *continuity*. Hal ini merupakan dasar untuk menggunakan biaya historis dalam menilai perkiraan yang lebih baik daripada nilai likuidasi, karena perusahaan dianggap akan terus menerus ada.[[87]](#footnote-87)

*Going Concern* menurut Adji Mulawarman dalam Bernard Nainggolan menyatakan *Going Concern* merupakan salah satu konsep penting akuntansi konvensional. Inti *Going Concern* terdapat pada *Balance Sheet* perusahaan yang harus merefleksikan nilai perusahaan untuk menentuakn eksistensi dan masa depannya. Lebih detail lagi, *Going Concern* adalah suatu keadaan bahwa perusahaan dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu kedepan, dan hal ini dipengaruhi oleh keadaan finansial dan non financial.

Kegagalan mempertahankan *Going Concern* dapat mengancam setiap perusahaan terutama diakibatkan oleh manajemen yang buruk, kecurangan ekonomis dan perubahan kondisi ekonomi makro seperti merosotnya nilai tukar mata uang dan meningkatnya inflasi secara tajam akibat tingginya tingkat suku bunga. Bahkan, *Going Concern* dalam akuntansi telah menjadi postulat akuntansi. Sebagai postulat, *Going Concern* menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi untuk melaksanakan proyekm komitmen dan aktivitas, yang sedang berjalan. *Going Concern* mengasumsikan bahwa perusahaan tidak diharapkan untuk dilikudasi dalam masa mendatang yang dapat diketahu dari sekarang.[[88]](#footnote-88)

Perusahaan didirikan dengan maksud untuk tidak dilikuidasi ( dibubarkan) dalam jangka waktu dekat, akan tetapi perusahaan diharapkan tetap terus beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Meskipun bayak juga dijumpai perusahaan – perusahaan yang mengalami kegagalan bisnis, namun berdasarkan asumsi ini seharusnya bahwa perusahaan akan hidup cukup lama atau memiliki kelangsungan hidup yang panjang untuk menjalankan visi dan misinya.[[89]](#footnote-89)

Asumsi inipun menekankan bahwa akan tersedia cukup waktu bagi entitas bisnis untuk menyelesaikan usaha, kontrak – kontrak, dan perjanjian – perjanjian.[[90]](#footnote-90)

1. **Yang Dapat Manjalankan *Going Concern /* Melanjutkan Usaha**

Yang dapat menjalankan *Going Concern* dalam hal Perusahaan telah Pailit ialah Kurator atas putusan dari Hakim Pengawas setelah diadakannya usulan dan rapat mengenai kelanjutan Perusahaan Debitor Pailit.

1. **Prosedur Pengajuan Melanjutkan Usaha (*Going Concern*)**
   1. **Usulan dan Rapat Mengenai Kelanjutan Perusahaan Debitor Pailit.**

Menurut Pasal 179 Ayat (1) UUK – PKPU, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahan Debitor Pailit dilanjutkan.[[91]](#footnote-91)

Berkenaan dengan usulan tersebut menurut Pasal 179 Ayat (2) UUK, jika ada panitia kreditor dan usul diajukan oleh kreditor, panitia kreditor dan kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut.[[92]](#footnote-92)

Dalam Pasal 179 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa atas permintaan Kurator atau salah seorang dari Kreditor yang hadir, Hakim Pengawas menunda pembicaraan dan pengambilan keputusan atas usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan paling lambat 14 ( empat belas ) hari sesudahnya. Kurator wajib segera memberitahu Kreditor yang tidak hadir dalam rapat mengenai akan diadakannya rapat dengan surat yang memuat usul tersebut dan diingatkan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, yang disebutkan dalam Pasal 179 Ayat (4).

Dalam Pasal 179 Ayat (5) yang menyebutkan bahwa dalam rapat tersebut, jika dianggap perlu dapat dilakukan pencocokan piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (10 dan belum dicocokkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113. Berdasarkan Pasal 179 Ayat (5) bahwa terhadap piutang yang dimaksud dalam Ayat (5), Kurator wajib bertindak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119.

Usul untuk melanjutkan perusahaan, wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari ½ ( satu perdua) dari semua piutang yang diakuin dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Berita acara rapat harus memuat nama kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing – masing Kreditor, hasil pemungutan surat, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut. Setiap orang yang bekepntingan dapat melihat berita acara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 180 Ayat (1),(3),dan (4) UUK – PKPU.

* 1. **Putusan Hakim Pengawas Mengenai Kelanjutan Perusahaan Debitor Pailit**

Berdasarkan Pasal 181 Ayat 1 UUK – PKPU apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari seteah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, kurator atau kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan Debitor Pailit, Hakim Pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambar 14 (empat belas) hari setelah ususl disampaikan kepada Hakim Pengawas.

Dalam Pasal 181 Ayat (2) UUK – PKPU Kurator wajib mengundang Kreditor paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan melampirkan surat usulan yang diajukan tersebut dan dalam surat tersebut Kreditor wajib diingatkan mengenai ketentuan dalam Pasal 119. Dalam Pasal 181 Ayat (3) UUK – PKPU kurator harus mengiklankan panggilan yang sama paling sediki dalam 2 (dua) surat kabar sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4) UUK – PKPU. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Ayat (2), Ayat (5), Ayat (6) dan Pasal 180 berlaku juga sebagimana disebutkan dalam Pasal 181 Ayat (4).

Berdasarkan Pasal 182 bahwa selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari dukumen ternyata Hakim Pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, maka kurator atau kreditor dapat meminta kepada Pengadilan untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.

1. **Pertanggung Jawaban terhadap Kelanjutan Usaha (*Going Concern*)**

Dalam hal Pelaksanaan *Going Concern* yang mempunyai tanggung jawab atas pelaksaan tersebut ialah Kurator karena dalam hal ini yang melaksanakan *Going Concern* ialah kurator semenjak adanya penetapan perizinin malanjutkan usaha maka kurator bertindak selayaknya organ perseroan atau Direksi.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Akibat Hukum terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas pada Kepailitan**
2. **Pembubaran Perseroan Terbatas**

Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan eksistensi Perseroan Terbatas berhenti dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnin untuk selama-lamanya. Kemudian diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.[[93]](#footnote-93)

Secara Hukum terjadinya Pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) Undang – Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan Pembubaran Terbatas terjadi karena :

1. Berdasarkan keputusan RUPS;
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telahberakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari dasar teradinya pembubaran perseroan diatas maka akan dijelaskan beberapa proses pembubaran yang diatur dalam undang – undang tersebut:

1. Proses Pembubaran Berdasarkan Keputusan RUPS

Tata cara pembubaran Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS diatur pada Pasal 144 Undang – Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 melalui proses berikut :[[94]](#footnote-94)

1. Yang berhak mengajukan usulan pembubaran

Yang berhak mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS menurut Pasal 144 Ayat (1), terdiri atas :

1. Direksi

Direksi dapat mengajukan usul pembubaran. Bukan angota Direksi, tetapi Direksi dalam Pengertian Dewan Direksi (*Board of Directors*). Anggota Direkso secara sendirian tidak berhak mengajukan usul pembubaran, tetapi harus berdasarkan Keputusan Rapat Direksi.

Dengan demikian, anggota direksi secara individual, tidak berhak mengusulkan pembubaran Perseroan kepada RUPS.

1. Dewan Komisaris (DK)

Yang kedua yang berhak mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS adalah DK. Dalam hal ini pun, yang berhak mengajukan usul harus DK secara majelis berdasarkan keputusan rapat DK. Anggota DK secara individual, tidal berhak mengusulkan pembubaran Perseroan kepada RUPS. Hal itupun sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Ayat (4) yang menegaskan DK terdiri atas lebih 1 (satu) orang anggota merupakan “majelis” dan setiap anggota DK secara individual, tidak dapat bertindak sendiri – sendiri melainkan harus berdasar keputusan DK.

1. Pemegang Saham

Yang ketiga, yang berhak mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS adalah pemegang saham :

* Boleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih,
* Dengan syarat, mereka mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Berarti hak itu oleh undang-undang diberikan kepada setiap pemegang saham asal terpenuhi syarat, paling sedikit mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Sekiranya jumlah saham yang dimilikinya tidak mencapai batas tersebut, dia dapat bergabung dengan pemegang saham yang lain, sampai terpenuhi paling sedikit mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Yang diajak jangan pemegan saham dimana saham yang dimilikinya tidak mempunyai hak suara.

1. Syarat sahnya keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan

Berdasarkan usul pembubaran Perseroan yang diajukan baik oleh pemegang saham, Direksi atau DK :

1. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai Pasal 79 Ayat (1)
2. Direksi melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 14 (emapat belas) hari sebelum tanggal RUPS diselenggarakan (Pasal 82 Ayat (1))
3. Pemanggilan dilakukan dengan Surat Tercatat atau dalam Surat Kabar dengan menyebut mata aacar rapat disertai pemberitahuan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan (Pasal 82 (3))

Demikian dengan ringkas syarat pemanggilan yang harus dipenuhi agar pemanggilan itu sah menurut hukum.

Selanjutnya, agar keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah menurtu hukum, apabila keputusan diambil sesuai dengan ketentus 144 ayat (12). Oleh karena itu agar keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah, harus terpenuhi syarat berikut :

1. Syarat kuorum kehadiran paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS
2. Syarat sahnya keputusan RUPS, apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS

Akan tetapi seperti yang dikatakan Pasal 144 Ayat (2), pengambilan keputusan RUPS hsrus juga sesuai dengan Pasal 87 ayat (1). Berarti sebelum dilakukan voting berdasarkan Pasal 89 Ayat (1), harus lebih dahulu diupayakan pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan persetujuan pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal ini perlu diingatkan, kemungkinan mengadakan RUPS kedua apabila RUPS pertama gagal mencapai kuorum sesuai Pasal 89 Ayat (3), maupun RUPS ketiga berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga, jika RUPS kedua gagal mencapai kuorum, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4).

1. Pembubaran mulai berlaku

Pembubaran Perseroan mulai proses RUPS mulai berlaku atau efektif menurut Pasal 144 ayat (3), terhitung sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan.

Sekiranya keputusan RUPS tidak menetapkan saat mulainya pembubaran, dapat dikonstruksi mulainya berlaku pada tanggal keputusan RUPS dibuat.

1. Proses Pembubaran Perseroan Berdasarkan Jangka Waktu Berdirinya Berakhir.[[95]](#footnote-95)

Sudah dijelaskan, salah satu cara pembubaran Perseroan yang dibenarkan Undang-undang ini, karena “jangka waktu berdirinya” yang ditetapkan dala AD telah “berakhir”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6, undang-undang ini, AD dapat menentukan jangka waktu berdirinya berdasarkan alternative berikut :

* Boleh didirikan untuk jangka waktu terbatas, misalnya 30 (tiga puluh) atau 75 (tujuh puluh lima) tahun, atau
* Bisa juga ditetapkan dalam AD jangka waktu berdirinya tanpa terbatas

Apabila AD memilih alternative pertama, dimana Perseroan didirikan untuk jangka waktu tertentu, maka proses pembubarannya menurut Pasal 145 adalah sebagai berikut :

1. Perseroan karena hukum (van rechtswege, ipso jure) bubar dengan sendirinya, sejak waktu berdirinya berakhir

Hal itu ditegaskan pada Pasal 145 Ayat (1), bahwa Perseroan karena hukum bubar apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam AD telah berakhir.

Kecuali sebelum jangka waktu berdirinya berakhir, diajukan permohonan perpanjangan dengan jalan melakukan perubahan AD sesuai tata cara yang ditentukan Pasal 22 jo. PAsal 21 Ayat (2):

1. Permohonan persetujuan perubahan AD mengenai perpanjangan jangka waktu, harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir, dan
2. Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut, paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.
3. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, RUPS menetapkan likuidator

Proses selanjutnya Pembubaran Perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir :

1. Harus diadakan RUPS untuk menetapkan pertunjukan “likuidator”
2. Jangka waktu mengadakan RUPS tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.
3. Direksi dilarang melakukan perbuatan hukum

Terhitung sejak tanggal jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir, Direksi tidak boleh atau dilarang melakukan perbuatan hukum.

Meskipun penjelasan Pasal 142 ayat (6) mengatakan pembubaran dan pengangkatan likuidator tidak berarti anggota Direksi dan DK memiliki diberhentikan, namun menurut Pasal 145 ayat (3), mereka tidak memiliki kapasitas dan kewenangan melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling, legal act).

Dengan berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas sebagaimana tercantuk dalam anggara dasar maka pada saat itu pula jabatan direksi berakhir.[[96]](#footnote-96) Semua perbuatan hukum dalam rangka pemberesan likuidasi, beralih seluruhnya kepada likuiditor.

1. Proses Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.[[97]](#footnote-97)

Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan penetapan pengadilan memiliki proses yang pada umumnya sama seperti proses perkara perdata, yaitu adanya pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu.[[98]](#footnote-98)

Cara lain pembubaran Perseroan yang diatur pada Pasal 142 Ayat (1) adalah berdasar Penetapan Pengadilan Negeri (PN). Proses Pembubarannya diatur lebih lanjut pada Pasal 146, seperti yang dijelaskan dibawah ini :[[99]](#footnote-99)

1. Penetapan pembubaran menjadi kompetensi absolut PN

Yuridiksi memeriksa dan menerbitkan Penetapan pembubaran Perseroan, jatuh menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum dalam hal ini PN, bukan kompetensi Pengadilan Niaga.

Sedang kompetensi relatifnya jatuh menjadi yuridiksi PN di tempat mana Perseroan berkedudukan.

1. Yang berhak mengajukan permohonan

Pembubaran Perseroan berdasar Penetapan PN, disebabkan adanya pengajuan permohonan oleh orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk itu. Berarti supaya permohonan pembubaran Perseroan ke PN memenuhi syarat, harus diajukan oleh orang atau pihak yang memiliki *legal standing (ligitima person standi in judicio)* untuk itu.

Siapa-siapa atau pihak mana saja yang memiliki kapasitas atas kedudukan (*hoedamigheid, quality or capacity*) mengajukan permohonan pembubaran ke PN, telah ditentukan secara limitative dan enumerative pada Pasal 146 ayat (1), yang terdiri dari :

1. Kejaksaan

Undnag-undang memberi *legal standing* atau *legitima* *persona standi in judicio* kepada Kejaksaan mengajukan Permohonan pembubaran Perseroan ke PN atas alasan :

* Perseroan melanggar kepentingan umum, atau
* Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan

Berarti jika kejaksaan mengajukan Permohonan pembubaran Perseroan hanya dapat diajukan ke pengadilan harus dengan alasan yang kuat bahwa Perseroan Terbatas melanggar kepentingan umum atua perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.[[100]](#footnote-100)

1. Pihak yang berkepentingan

Undang-undang ini tidak menentukan secar spesifik siapa atua pihak mana saja yang digolongkan pihak yang berkepentingan. Akan tetapi jika hak itu dikaitkan dengan alasan permohonan pembubaran yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan hanya terbatas berdasarkan Akta Pendirian, dapat ditarik kesimpulan, yang dimaksud dengan pihak yang berkentingan, antara lain terdiri dari pendiri, pemegang saham, anggota direksi atau DK maupun kreditor. Kedalamnya, tidak termasuk Kejaksaan, karena kepadanya telah ditentukan dengan tegas porsi alasan yang sah baginya mengajukan Permohonan pembubaran Perseroan.

1. Pemegang saham, direksi atau DK

Selain kejaksaan dan pihak yang berkepentingan Pasal 146 ayat (1) huruf c, memberi kapasitas *legal standing* juga kepada :

* Pemegang Saham
* Direksi
* Dewan Komisaris

Mereka berhak untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan Negeri. Dasar alasan permohonan yang dapat mereka ajukan, hanya terbatas pada alasan “Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”

Menurut Penjelasan Pasal 146 (1) huruf c, yang dimaksud dengan alasan “Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain :

* Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada “intansi pajak”
* Dalam hal sebgaian besar pemegang saham sudah “tidak diketahui alamatnya” walaupun telah dipanggil melauli iklan dalam Surat Kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS
* Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misal 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing –masing 50% (lima puluh persen) saham, atau
* Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan ushaanya.

Alasan permohonan pembubaran ini hampir sama substansinya dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) KUHD. JIka Perseroan mengalam kerugian sebesar 75% (tujuh puluh persen) dari modalnya, maka Perseroan demi hukum (*van rechtswege, ipso jure)* bubar. Perbedaan antara Pasal 47 ayat (2) KUHD dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT 2007 :

* Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf d UUPT 2007, pembubaran tidak terjadi karena hukum, tetapi harus diajukan pembubaran kepada PN, yang akan bertindak mengeluarkan Penetapan pembubaran
* Sebaliknya berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) KUHD, Pembubaran Perseroan apabila mengalami kerugian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal Perseroan, demi hukum menjadi bubar.

1. Penetapan Pengadilan Negeri/Niaga (PN) menunjuk likuidator

Hal lain yang diatur megenai pembubaran Perseroan berdasar Penetapan PN adalah penunjukan likuidator. Di dalam Permohonan penetapan pengadilan, pihak ang mengajukan permohonan pembubaran Perseroan juga mengajukan nama likuidator yang akan melakukan pemberesan terhadap aset-aset Perseroan Terbatas, melakukan pembayaran hutang Persertoan Terbatas terhadap kreditur, serta membagikan sisa kekayaan Perseroan kepada pemegang saham Perseroan (bila ada).[[101]](#footnote-101)

Menurut Pasal 146 ayat (2), dalam Penetapan PN yang mengabulkan permohonan pembubaran Perseroan, harus juga menetapkan “penunjukan” likuidator. Penetapan PN yang lalai menetapkan penunjukan likuidator, mengakibatkan penetapan itu tidak dapat dijalankan, karena tidak ada likuidator yang akan bertindak melakukan pemberesan.

Barangkali untuk mengatasi kasus Penetapan yang lalai menetapkan penunjukan likuidator, dapat ditempuh dua cara :

1. Menerapkan ketentuan Pasal 142 ayat (3), yakni dengan sendirinya Direksi bertindak selaku likuidator, atau
2. Mengajukan permohonan lagi, agar PN menunjuk likuidator.
3. Proses Pembubaran Karena Harta Pailit Perseroan Tidak Cukup untuk Membayar Biaya Kepailitan[[102]](#footnote-102)

Lengkapnya Pasal 142 ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut :

“ Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.”

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, cara pembubaran yang diatur di dalamnya, berkaitan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UU KPKPU)

Menurut Pasal 17 ayat (2) UU KPKPU, Majelis Haki, yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Selanjutnya Penjelasan pasal ini memberi pedoman kepada Majelis Hakim yang memutus perkara kepailitan, supaya biaya kepailitan ditetapkan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas.

Biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator menurut Pasal 17 Ayat (3) UU KPKPU, dibebankan kepada “pihak pemohon” pernyataan pailit (*voluntair petition*) atau kepada pemohon pailit (*involuntair petition*) dan Debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut. Dan untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Eksekusi atas permohonan Kurator.

Berkaitan dengan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang dikemukakan di atas, Pasal 18 mengatur tata cara “pencabutan putusan pernyataan pailit” sebagai berikut:

1. Majelis hakim dapat mencabut putusan pernyataan pailit

Apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, Pengadilan Niaga atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara (jika ada), serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan “pencabutan putusan pernyataan pailit”, dan putusan itu diucapkan dalam siding terbuka untuk umum.

Dalam penetapan pencabutan putusan kepailitan ini, Pengadilan Niaga sekaligus memutuskan pemberhentian Kurator sesuai dengan tata cara yang diatur dalam UU KPKPU.

1. Majelis menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator

Majelis Hakim yang memerintahkan pencabutan putusan pernyataan pailit :

* Menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator
* Biaya tersebut dibebankan kepada Debitur, dan
* Terhadap penetapan Majelis Hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, tidak dapat diajukan upaya hukum.

1. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan eksekusi

Tata cara pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Ekseskusi atas permohonan Kurator dan diketahui Hakim Pengawas.

Dari Penjelasan diatas, apabila harta pailit perseroan tida cukup untuk membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dapat memutuskan “pencabutan” putusan pernyataan pailit.

Maka dalam kasus yang demikian menurut Pasal 142 Ayat (1) huruf d, terjadi pembubaran Perseroan. Serta menurut Pasa l42 ayat (3), RUPS harus menunjuk likuidator, dan apabila RUPS tidak menunjuknya, dengan sendirinya menurut hukum Direksi bertindak sebagai likuidator.

1. Proses Pembubaran Karena Harta Pailit yang Telah dinyarakan Pailit Dalam Keadaan Insolvensi.[[103]](#footnote-103)

Kepailitan dapat berakhir setelah debitor telah membayar penuh keajiban yang dimilikinya terhadap para kreditor atau daftar pembagian penutup memperoleh kekuatas yang pasti. Namun demikian apabila setelah berakhirnya pembagian harta pailit ternyata masih terdapat harta-harta kekayaan debitor, maka atas perintah pengadilan niaga, kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang pernah dibuat sebelumnya.[[104]](#footnote-104)

Ketentuan Pasal 142 Ayat (1) huruf e selengkapnya berbunyi, pembubaran Perseroian terjadi :

“ Karena Harta Pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang”

Proses cara pembubaran karena harta pailit Perseroan berada dalam keadaan insolvensi, berkaitan dengan ketentuan Pasal 187 UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU.

Menuru pasal ini, setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu Raoat Kreditor pada hari, jam dan tempat yang ditentukan. Tujuan rapat, untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit, dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang yang dimasukka setelah berakhir tenggang waktu. Berdasar Pasal 113 ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan :

1. Batas akhir pengajuan tagihan
2. Batas akhir verifikasi pajak
3. Hari, tanggal, waktu, dan tempat Rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Apabila ada lagi yang mengajukan tagihan setelah melampaui waktu yang ditentukan dalam penetapan Hakim Pengawas, maka menurut Pasal 187 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 KPKPU, masih dapat dilakukan pencocokan dalam Rapat Kreditor mengenai cara pemberesan harta pailit yang diadakan oleh Hakim Pengawas.

Jika ketentuan ini dikaitkan dengan cara terjadinya pembubaran yang disebut Pasal 142 Ayat (1) huruf e UUPT 2007, setelah dijatuhkan putusan pernyataan pailit, harta pailit berada dalam keadaan insolvensi atau dalam keadaan pailit (*staat van faillissement, state of bankruptcy*).

Dalaam keadaan yang demikian menurut Pasal 187 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, Hakim Pengawas mengadakan Rapat Kreditor untuk membicarakan cara pemberesan harta pailit.

Bertitik tolak dari ketentuan yang dikatakan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) huruf e, terhitung sejak Perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Perseroan telah berada dalam keadaan “insolvensi” (*staat van faillissement, state os bankruptcy*). Berarti sejak saat itu terjadi pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasa l142 ayat (1) huruf e UUPT 2007. Oleh karena itu, RUPS menunjuk likuidator untuk melakukan likuidasi.

1. Proses Pembubaran Karena Izini Usaha Dicabut[[105]](#footnote-105)

Cara terjadinya Pembubaran Perseroan yang lain, diatur pada Pasal 142 ayat (1) huruf f yang berbunyi :

“Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan pasal ini mengatakan yang dimaksud dengan “dicabutnya usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi”, adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahnaya dicabut, misalnya izin usaha perbankan atau izin usaha perasuransian dicabut. Berarti tidak mungkin lagi berusaha dalam bidang lain, misalnya perdagangan atau kontraktor.

Terjadinya pembubaran perseroan jika izin usahnya dicabut, bersifat imperatif, yakni Perseroan “wajib” melakukan likuidasi. Memang sifat imperatifnya digantungkan pada syarat, apabila pencabutan izin itu, mengakibatkan Perseroan tidak mungkin lafi berusaha dalam bidang lain. Oleh karena itu, kalau izin usaha Perseroan yang bersangkutan meliputi berbagai bidang usaha dan salah satu diantaranya dicabut, tidak terjadi pembubaran Perseroan.

1. **Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit**

Akibat dari pernyataan pailit adalah bahwa organ Perseroan Terbatas demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya harta kekayaan tersebut. Organ Perseroan Terbatas tidak boleh melakukan pengurusan terhadap Perseroan Terbatas dengan kehendaknya sendiri dan segala perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk yang dapat merugikan para Kreditor dapat dituntut pidana.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan dimana Perseroan Terbatas hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya dan hak untuk mengurus kekayaannya, dalam hal ini Perseroan Terbatas sebagai Debitor Pailit tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak ada hubunganya dengan harta pailit.

Dalam hal kepailitan badan hukum perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, bubar tidaknya perseroan tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan pembubaran perseroan karena didalam undang-undang kepailitan dan undang – undang hukum perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007 tidak adanya pengaturan mengenai pembubaran demi hukum perseroan terbatas secara lebih terperinci. Pembubaran Perseroan terbatas hanya dikenal di dalam Pengaturan KUHD yaitu alasan-alasan pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir dan bubar demi hukum karena kerugian yang mencapai 75 % dari modal perseroannya. Akan tetapi dalam undang-undang Perseroan Terbatas mengenal adanya pembubaran karena penetapan pengadilan tetapi tidak mengenal adanya pembubaran demi hukum.

Menurut Ketentuan Pasal 142 UUPT, Pembubaran Perseroan terjadi :

1. Berdasarkan keputusan RUPS;
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telahberakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Akibat hukum terhadap status badan hukum Perseroan Terbatas yang bubar akibat kepailitan dan perusahaan yang mengalami *Going Concern***
8. **Akibat Hukum Terhadap Status Badan Hukum Perseoran Terbatas yang Bubar akibat Kepailitan**
   1. **Kedudukan Perusahan yang Bubar akibat Kepailitan**

Pembubaran Perseroan Terbatas tidak mengakibatkan Perseroan Terbatas kehilangan statusnya sebagai suatu badan hukum.[[106]](#footnote-106)Pada Pasal 143 Ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas baru akan kehilangan statusnya sebagai suatu badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengasilan. Ketentuan ini menegaskan keberadaan status Peseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas telah dibubarkan. Sebelum proses likuidasi selesai dan dipertanggung jawabnkan kepada RUPS atau Pengadilan oleh Likuidator, badan hukum Perseroan Terbatas masih tetap eksis.[[107]](#footnote-107)

Sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 143 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan maka harus dihapuskan Pula mengenai status badan Hukum PT tersebut.

Kemudian dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga menegaskan :

* 1. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
  2. Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
  3. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.
  5. Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.
  7. Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.
  8. Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Maka sesuai dengan Pasal tersebut, ujung dari Pembubaran PT adalam berakhirnya status badan Hukum Perseroan dalam Berita Acara Republik Indonesia.

Badan hukum perseroan terbatas tersebut terkait dengan pendaftaran Perusahaan yang telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 diterangkan bahwa setiap Perseroan terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan komanditer (CV), Firma (fa), Perseroan, dan bentuk usaha lainnya (BUL) termasuk kantor asing dengan status Kator Pusat, kantor tunggal, kantor Cabang, kantor pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan di Wilayah kesatuan Republik Indonesia Wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Setalah mendaftarkan perusahaannya atau perseroan maka akan mendapat Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP) yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya dan wajib diperbaharui paling lambat (3) tahun.

Sebuah badan Usaha termasuk PT yang sudah didaftarkan, juga dapat dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi perubahan bentuk perusahaan, pembubaran, penghentian segala usaha kegiatannya, berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir auat bubar berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pokok permasalahan ini, Perseroan dapat dihapusakan dari daftar perusahaan apabila dibubarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007.

Lebih lanjut, Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 dalam penghapusan oleh karena pembubaran PT, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan semenjak dihitung hari pembubaran wajib memberitahukannya kepada Menteri yang berwenang dan wajib pula memberitahukannya kepada kepala KKP Kabupaten/Kota/ Kotamadya setempat dengan menyertakan :

1. Bukti Penerimaan pemberitahuan dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perundang-udangan.
2. TDP asli

Di kota/Kabupaten/ Kota Madya, penghapusan Ijin TDP dilakukan melalui dinas perijinan yang  memiliki beberapa persyaratan yaitu :

1. Formulir permohonan bermaterai 6000
2. Salinan KTP/Keterangan Domisili
3. Bukti Pemberitahuan dari kementerian Hukum dan HAM tentang Pembubaran PT
4. TDP asli
5. Laporan serta alasan Penutupan Perusahaan.

Dalam 5 Hari jangka waktu Penurusan ijin harus sudah selesai dan ketika ijin penghapusan tersebut sudah keluar maka selesai sudah proses Pembubaran PT dan badan hukumnya sudah terhapuskan. Ketentuan mengenai pengumuman pembubaran Perseroan Terbatas oleh likuidator ini juga diterapkan di Negara lain seperti Inggris.[[108]](#footnote-108)

* 1. **Pembubaran PT. MD (d/h MDC) akibat Kepailitan**

Setelah adanya keputusan Pailit pada PT. MD (d/h MDC) dengan putusan NO. 51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dimana hasil dari putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan PT. MD (d/h MDC) pailit dengan segala akibatnya. Kemudian atas putusan tersebut Termohon Pailit mengajukan permohonan kasasi lisan, namun putusan Kasasi ini dengan putusan No, 853K/Pdt.Sus/2010, serta putusan Peninjauan kembali dengan No. 066PK/Pdt.Sus/2011 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya.

Dengan adanya pernyataan Pailit pada PT. MD (d/h MDC) ini maka secara otomatis Debitor Pailit kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta pailit pada PT. MD (d/h MDC) tersebut dan pengurusan serta pemberesan boedel pailit pada PT. MD (d/h MDC) beralih kepada Kurator. Setelah adanya kepailitan maka kurator mengumumkan kepailitan debitor dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditentukan oleh hakim pengawas, dan melakukan rapat verifikasi utang dengan hakim pengawas, selanjutnya kurator melakukan perdamaian dengan memberikan kesempatan debitor untuk mengajukan rancangan perdamaian dengan para kreditor.

Dalam hal rapat rencangan perdamaian yang diajukan oleh Debitor dalam hal ini PT. MD (d/h MDC) tidak diterima atau tidak disetujui oleh para kreditor maka kurator melanjutkan proses kepailitan tersebut kedalam tahap insolvensi.

Dalam rangka pemberesan boedel pailit PT. MD (d/h MDC) maka kurator melakukan penjualan di muka umum (lelang) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 juni 2011 dan 06 juli 2011 atas tanah beserta segala sesuatu yang melekat diatasnya termasuk bangunan apartemen, yang terletak di Jl. Landas Pacu Utama Utara Selatan Blok IX A, Kemayoran, Pademangan Timur, Jakarta Utara namum pada lelang tersebut tidak ada peminat yang membelinya.

Dalam hal penjualan dimuka umum (lelang) tidak tercapai maka kurator melakukan penjualan dibawah tangan atas harta boedel pailit dengan seijin hakim pengawas sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat (2) Undang-undang Kepailitan:

”Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas”

Kurator dengan seijin hakim pengawas melakukan penjualan dibawah tangan atas harta boedel pailit berupa tanah beserta segala sesuatu yang melekat diatasnya termasuk bangunan apartement dengan akta Jual Beli No. 165/2011 Tanggal 03 November 2011 dan akta jual beli No. 166/2011 Tanggal 03 November 2011. Setelah terjualnya boedel pailit maka kurator melakukan pambagian harta pailit dan telah diumumkan dalam pengumuman Peletakkan Daftar Pembagian dalam surat kabar harian Nasional pada tanggal 22 September 2011.

Setelah dilaksanakannya pembagian harta pailit maka kepailitan PT. MD (d/h MDC) telah dinyatakan berakhir dan diumumkan dalam surat kabar Nasional pada tanggal 31 oktober 2011, Pada pasal 142 Ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana dalam hal terjadi pembubaran perseroan wajib diikuti dengan Likuidasi yang dilakukan oleh Likuidator atau Kurator. Oleh karena itu Pembubaran Perseroan PT. MD (d/h MDC) karena kepailitan telah dilakukan likuidasi oleh likuidator sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. MD (d/h MDC) No. 42 Tanggal 14 Desember 2012 dan telah diumumkan pula di Surat Kabar Harian tanggal 26 Desember 2012.

Dengan adanya Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. MD (d/h MDC) maka status badan hukum dari PT. MD (d/h MDC) telah dicabut atau benar benar telah bubar sesuai dengan Pasal 143 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana menyebutkan bahwa :

”Pembubara Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban dari likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan”

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pembubaran Perseroan tersebut tidak menghapus badan hukumnya yang telah didaftarkan sampai dengan likuidasi dan pertanggungjawaban likuidatornya diterima oleh RUPS atau Pengadilan Niaga

1. **. Akibat Hukum Terhadap Status Badan Hukum Perseoran Terbatas akibat *Going Concern***
   1. **Kedudukan Perusahaan Pailit yang Melanjutkan Usaha (*Going Concern*)**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dapat diketahui bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba”

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini, baik yang bergerak dibidang perorangan ataupun suatu badan hukum adakalanya tidak memiliki modal yang cukup untuk membiayai keperluan dan kegiatannya, untuk dapat mencukupi kekurangan modal tersebut seseorang atau perusahaan baik yang tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum dalam hal ini adalah Perseroan terbatas, dapat melakukan pinjaman dari pihak lain.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah :

“Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Bila ketentuan diatas dikaji dapat diuraikan bahwa Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :[[109]](#footnote-109)

1. Badan Hukum
2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian
3. Melakukan Kegiatan Usaha
4. Modal Dasar Terbagi atas Saham
5. Memenuhi Persyaratan Undang-Undang

Perusahaan yang berbadan hukum yang mengalami permasalahan keuangan sering kali menempuh jalur permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor untuk memenuhi pembayaran piutangnya, sehingga seringkali perusahaan yang dimohonkan pailit dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sepanjang telah memenuhi syarat- syarat kepailitan sebagimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UUK – PKP sebagai berikut :

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor
2. Mempunyai Utang
3. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
4. Pembuktian dilakukan secara sederhana.

Dalam UUPT telah diatur mengenai pembubaran Perseroan Terbatas, yang salah satu alasan pembubarannya merupakan akibat dari kepailitan. Pada umumnya setiap perusahaan atau perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit baik karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan perusahaan yang dinyatakan pailit dan/atau mengalami insolvensi, selalu dibubarkan baik dalam hal berhenti beroperasi ataupun pembubaran badan hukum perseroan terbatas tersebut.

Dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas, menurut Pasal 142 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dasar berakhirnya suatu perseroan karena:[[110]](#footnote-110)

1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya pailit;
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UUPT
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan yang dinyatakan pailit tidak secara otomatis dilikuidasi karena perusahaan yang dinyatakan pailit masih dimungkinkan untuk dilanjutkan usahanya, apabila kurator menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek untuk meningkatkan boedel pailit.

Perusahaan yang berbadan hukum yang mengalami permasalahan keuangan sering kali menempuh jalur permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor untuk memenuhi pembayaran piutangnya, sehingga seringkali perusahaan yang dimohonkan pailit dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sepanjang telah memenuhi syarat- syarat kepailitan sebagimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UUK – PKP sebagai berikut :

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor.
2. Mempunyai Utang.
3. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
4. Pembuktian dilakukan secara sederhana.

Kepailitan merupakan sita umum harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dalam pengawasan hakim pengawas.

Menurut Siti Soetami Hartono, Kepailitan adalah suatu lembaga hukum dalam hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.[[111]](#footnote-111)

Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda – benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing – masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan – alasan yang sah untuk didahulukan”

Didalam penjelasan Undang – undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang, memberi peluang bagi perusahaan yang menurut penilaian kurator, Panitia Kreditor dan atas izin Hakim Pengawas masih memiliki Prospek Usaha yang Baik, dapat tetap dilangsungkan. Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, tidak semata – mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan – kepentingan Kreditor atas utang – utang Debitor saja, tetapi lebih daripada itu, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam asas – asas Undang – undang Kepailitan dan PKPU ini, ditujukan untuk melindungi seluruh kepentingan – kepentingan para pihak dan bahkan dengan pertimbangan untuk kepentingan ekonomi nasional atau kepentingan Negara.[[112]](#footnote-112)

Suatu Undang – Undang Kepailitan, termasuk Undang – Undang Kepailitan Indonesia, seyogianya memuat asas – asas sebagai berikut :[[113]](#footnote-113)

1. Undang – Undang Kepailitan harus dapat mendorong kegairahan Investasi Asing, mendorong Pasar Modal dan memudahkan Perusahaan Indonesia memperoleh Kredit Luar Negeri.
2. Undang –Undang Kepailitan harus memberikan perlidungan yang seimbang bagi Kreditor dan Debitor.
3. Putusan pernyataan pailit seyogianya berdasarkan persetujuan pada Kreditor Mayoritas.
4. Permohonan Pernyataab Pailit seyogianya hanya dapat diajukan terhadap Debitor yang Insolven yaitu tidak membayar utang – utangnya kepada Kreditor Mayoritas.
5. Sejak dimulainya Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit seyogianya diberlakukan keadaan diam (*Standstill atau Stay)*.
6. Undang – Undang Kepailitan harus mengakui Hak Separatis dari Kreditor pemegang hak jaminan.
7. Permohonan Pernyataan Pailit Harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
8. Proses Kepailitan harus terbuka untuk umum.
9. Pengurus Perusahaan yang karena kesalahanny mengakibatkan Perusahaan Dinyatakan Pailit harus bertanggung jawab secara pribadi.
10. Undang – Undang Kepailitan seyogianya memungkinkan utang debitor diupayakan direstrukturisasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.
11. Undang – Undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut Kepailitan Debitor.

Dalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit, dibacakan bergantung kepada cara pandang atau penilaian kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Kalau perseroan dinilai *going concern,* kurator tentu akan memilih untuk melanjutkan usaha perseroan demi kepentingan banyak pihak terutama para kreditor.[[114]](#footnote-114)

Pengertian asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Norma tersebut dalam Pasal 104 Ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

“Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Sedangkan menurut Pasal 104 Ayat (2) merumuskan :

“Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Jika dipandang perlu, kurator juga berwenang atas persetujuan panitera kreditor untuk melanjutkan usaha (*going concern*) debitor, jika hal itu dipandang menguntungkan pada harta pilit. Langkah ini merupakan langkah yang sangat strategis, khususnya jika debitor pailit adalah sebuah Perseroan Terbatas. Langkah ini juga merupakan langkah yang hanya bisa dilakukan kurator jika debitor adalah badan hukum dan tidak dapat dilakukan terhadap debitor perorangan karena debitor perorangan dan usaha yang dijalankan etitas yang berbeda.[[115]](#footnote-115)

*Going Concern* merupakan salah satu konsep penting akuntansi konvensional. Inti *Going Concern* terdapat pada *Balance Sheet* perusahaan yang harus merefleksikan nilai perusahaan untuk menentuakn eksistensi dan masa depannya. Lebih detail lagi, *Going Concern* adalah suatu keadaan bahwa perusahaan dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu kedepan, dan hal ini dipengaruhi oleh keadaan finansial dan non financial.

Kegagalan mempertahankan *Going Concern* dapat mengancam setiap perusahaan terutama diakibatkan oleh manajemen yang buruk, kecurangan ekonomis dan perubahan kondisi ekonomi makro seperti merosotnya nilai tukar mata uang dan meningkatnya inflasi secara tajam akibat tingginya tingkat suku bunga. Bahkan, *Going Concern* dalam akuntansi telah menjadi postulat akuntansi. Sebagai postulat, *Going Concern* menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi untuk melaksanakan proyekm komitmen dan aktivitas, yang sedang berjalan. *Going Concern* mengasumsikan bahwa perusahaan tidak diharapkan untuk dilikudasi dalam masa mendatang yang dapat diketahu dari sekarang.[[116]](#footnote-116)

Dengan pertimbangan tetap beroperasinya usaha dari perseroan terbatas pailit maka dimungkinkan adanya keuntungan yang akan diperoleh diantaranya yaitu dapat menambah harta si pailit dengan keuntungan – keuntungan yang mungkin lambat laun si pailit akan dapat membayar utangnya secara penuh, kemungkinan tercapai suatu perdamaian.[[117]](#footnote-117)

Asas Kelangsungan usaha ini, bermaksud untuk melindung kepentingan Debitor Pailit atas kepentingan beberapa Kreditor yang menghendaki segera diselesaikan utang – utang debitor dinyatakan pailit secara otomatis kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurusi kekayaan yang termasuk dalam harta pailit.[[118]](#footnote-118)

Kelanjutan usaha dari suatu perusahaan perseroan terbatas yang dinyatakan pailit bergantung dari cara pandang kurator serta kreditor atas prospek usaha debitor pailit di masa datang, jika dianggap Perseroan Terbatas masih memiliki prospek bisnis yang menguntungkan maka akan dilakukan kelanjutan usaha.

Dalam hal ini Kurator dan Kreditor dalam hal untuk melanjutkan perusahaan yang telah pailit harus mengajukan permohonan kelanjutan usaha :

1. Usulan dan Rapat mengenai Kelanjuatan Perusahaan Debitor Pailit.
2. Putusan Hakim Pengawas Mengenai Usulan tentang Melanjutkan Perusahaan Debitor Pailit.

Dalam hal pengajuan usul dan rapat mengenai kelanjutan Perusahaan debitor pailit maka kurator menganggap bahwa perusahaan tersebut dapat menguntungkan bagi pihak kreditor bila usahanya dilanjutkan.

Setelah pengajuan usul tersebut kepada hakim pengawas maka dalam rapat pengajuan usul tersebut setelah selesainya rapat maka hakim pengawas akan menyatakan usulan tersebut dapat diterima ataupun ditolak. Jika usulan tersebut diterima maka perusahaan yang telah pailit tersebut dapat aktif kemabali.

Dalam hal melanjutkan perusahaan debitor pailit yang diatur dalam Pasal 179 UUK – PKPU yang mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas dan Para Kreditor. Hal tersebut haruslah memenuhi dua syarat.

Syarat – syarat yang dimaksud adalah :[[119]](#footnote-119)

1. Syarat Prosedural

Mengenai syarat procedural, terjadinya upaya melanjutkan perusahaan debitor pailit sebagaimana diuraikan diatas bahwa atas usulan kreditor atau kurator, dan selanjutnya mendapat izin Hakim Pengawas, dan usulan tersebut disetujui oleh Krediitor yang mewakili lebiih dari ½ ( satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

1. Syarat Tujuan atau Substansial

Sedangkan syarat tujuan atau syarat substansial, usaha melanjutkan perusahaan debitor pailit tersebut baik terlepas dari tugas Kurator untuk meningkatkan mutu boedeol pailit atau untuk meningkatakan mutu noedel pailit atau untuk kepentingan Kreditor. Oleh karena itu syarat mutlak dilakukannya tindakan melanjutkan perusahaan debitor pailit adalah bila mana Kurator yakin dan dapat menunjukkan bahwa tindakan melanjutkan perusahaan debitor tersebut adalah unutk meningkatkan mutu atau nilai boedel paili yang nantinya akan menguntungkan para kreditr, yang disertai dasar bahwa perusahaan masih *going concern*.

* 1. **Status Perseroan Terbatas yang Melanjutkan Usaha (*Going Concern*)**

Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa, demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU, pengurusan dan pemberesan mengenai harta pailit beralih kepada Kurator.

Dalam Ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 24 UUK – PKPU tidak berlaku pada :

* + - 1. Benda, termasuk hewan yang benar – benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat – alat medis yang di pergunakan untuk kasehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakana oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 ( tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu.
      2. Segala sesuatu yang di peroleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, atau
      3. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban member nafkah menurut undang – undang.

Putusan Pailit oleh pangadilan tidak mengakibatkan Debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handekingsbevoegd)* pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuatan atau kewenangan unutk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Dengan demikian , Debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum berupa misalnya menikah, atau membuat perjanjian kawin atau menerima hibah, atau bertindak menjadi kuasa atau mewakili pihak lain dan lain sebaggainya.[[120]](#footnote-120)

Akibat kepailitan yang dialami oleh Debitor hanyalah berupa kehilangan kekuasaan ataupun sudah tidak dapat mengurus harta kekayaan Debitor. Debitor masih dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, kecuali perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan perusahan dan pengalihan harta benda yang telah ada dan dipailitkan.

Tindakan pengurusan dan pengalihan harta kekayaan berada pada kekuasaan kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperoleh oleh debitor, debitor dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut tetapi harta yang diperoleh tersebut secara langsung menjadi harta pailit / boedel pailit.

Sebagai akibat putusan pailit tersebut, kekuasaan Direksi suatu Perseroan Terbatas dan badan – badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan Debitor atau badan – badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitor atau badan hukum tersebut “terpasung”, sekalipun mereka tetap menjabat dalam jabatan tersebut. Pengurus perusahaan Debitor atau badan – badan hukum lainnya menjadi *functus officio*. Segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh Kurator. Mereka tidak memiliki kendali terhadap Kurator, sebaliknya mereka harus mematuhi petunjuk – petunjuk dan perintah – perintah kurator.[[121]](#footnote-121)

Dalam hal tersebut diatas Akibat dari Kepailitan yaitu mencabut hak perdata Debitor, tetapi Debitor masih dapat melakukan perbuatan – perbuatan hukum, dan Debitor masih dapat bekerja dalam hal menjalankan perusahaannya tetapi pada saat pernyataan pailit maka dalam hal menjalankan perusahaan tersebut Debitor tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa adanya persetujuan dari Kurator, karena kurator memiliki hak penuh dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan sangat penting dalam proses penyelesaian Kepailitan. Kurator diangkat oleh Pengadilan, dengan tugas utama adalah mengurus dan membereskan harta Pailit (Boedel Pailit).

Pasal 13 Ayat (1) Undang – Undang No 14 Tahun 1998 UUK – PKPU menyebutkan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat :

1. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan, dan
2. Kurator

Kurator memiliki kedudukan yang penting dan sangat kuat dalam proses penyelesaian suatu kepailitan disamping Hakim Pengawas .

Undang – Undang No. 4 Tahun 1998 yang kemudian dipertegas dengan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 maka yang dapat bertindak sebagai Kurator selain Balai Harta Peninggalan juga orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kewenangan mengurus harta kekayaan Perseroan Terbatas ini akan beralih pada Kurator yang akan bertanggung Jawab atas pemberesan harta pailit, sebab baik Direksi maupun komisaris tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta pailit. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus perusahaan, diluar pengurusan kekayan perusahaan tetap berada di tangan Direksi dan Komisaris. Adanya kurator tidak meniadakan hak dan kewajiban Direksi sebagai pengurus yang merupakan organ perseroan, karena Kurator hanya mengambil alih hak untuk mengurus dan membereskan kekayaan perusahaan pailit, dan tidak mengambil oper hak dan kewajiban lainnya .[[122]](#footnote-122)

Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit merupakan maksud yang berbeda menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana pengurusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kurator sejak dari putusan pernyataan pailit, yaitu berupa segala rangkaian yang berkaitan dengan pencocokan piutang, perdamaian, dan bahkan sampai kepada pemberesannya.

Pengurusan adalah menginventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai dan bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai. Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh, baik putusan kasasi atau peninjauan kembali , maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi Debitor pailit.

Sedangkan pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitor pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi) setelah adanya putusan pernyataan pailit.

Jika dilihat secara utuh ketentuan dalam UUK – PKPU yang berkaitan dengan Kurator, dapat disimpulkan bahwa Kurator memiliki tiga bidang tugas dan wewenang utama, yaitu:[[123]](#footnote-123)

1. Tugas dan Wewenang Administratif

Dalam kapasistas administratifnya Kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses – proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman –pengumumang, mengundang rapat – rapat kreditor, mengamankan harta kekayaan debitor pailit, melakukan inventarisasi harta pailit, serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas.

Dalam menjalankan kapasitas administratifnya , Kurator memiliki kewenangan antara lain : kewenangan unutk melakukan upaya paksa seperti paksa badan dan melakukan penyegelan (bila perlu).

1. Tugas dan Wewenang Mengurus / Mengelola Harta Pailit

Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan *Insolvensi* (tidak mampu membayar), kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha – usaha debitor pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas izin rapat kreditor. Pengelolaan harta dapat dilakukan apabila debitor pailit masih memilii suatu usaha yang masih berjalan.

Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk diantaranya :

1. Kewenangan untuk membuka seluruh koresponden yang ditujukan kepada debitor pailit.
2. Kewenangan untuk menjamin dana pihak ketiga dijamin dengan harta pialit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha
3. Kewenangan khusus untuk mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja, dan perjanjian lainnya.
4. Melakukan Penjualan – Pemberesan

Tugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksud dari pemberesan disini adalah suatu keadaan bahwa Kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit.

Dari uraian diatas telah diketahui tugas dan kewenangan Kurator dalam hal pengurusan, pengelolaan dan pemberesan Harta Pailit. Dalam pengurusan dan pengelolaan Kurator harus dapat melakukan upayah yang maksimal dalam melakukan tugas tersebut untuk dapat mengamankan harta pailit dan menyiman semua surat, dukumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berhaga lain dengan memberikan tanda terima.

Sebelum melakukan pemberesan, Kurator harus menguangkan seluruh boedel pailit. Salah satu prinsip yang harus dipegang oleh para Kurator dalam proses pemberesan harta pailit adalah *CASH IN THE KING*, yakni Kurator sedapat mungkin harus menguangkan seluruh harta pailit, tidak hanya itu saja Kurator juga berhak melakukan penjualan asset debitor dalam proses kepailitan, adapun kewenangan kurator dalam menjual harta debitor dalam hal sebagai berikut:[[124]](#footnote-124)

1. Menjual aset debitor yang hasilnya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
2. Menjual aset debitor untuk menutupi ongkos kepailitan.
3. Menjual aset, karena menahan aset tersebut dapat mengakibatkan kerugian.
4. Menjual barang jaminan hutang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan hutang atau setelah masa pengangguhan.
5. Menjual aset yang diperlukan untuk kelangsungan usaha.

Dalam hal menjual harta Debitor pailit juga ada hal yanh harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit. Untuk itu harus dilakukan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :[[125]](#footnote-125)

* 1. Pertimbangan yuridis

Tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitor pailit tidak disalahkan, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut. Misalnya, kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjual, apakah memerlukan izin tertentu, undang – undang mana dan pasal berapa yang mengatur dan sebagainya.

* 1. Pertimbangan Bisnis

Selain dari pertimbangan yuridis, Kuratr yang menjual aset debitor juga harus memperhaikan pertimbangan bisnis. Jika perlu, dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan – masukan untuk bahan pertimbangan bisnis disini adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-tingginya. Karena itu harus dipertimbangkan, antara lain hal-hal sebagai berikut:

* + 1. Kapan saat yang tepat untuk menjual asset debitor tersebut, agar diperoleh harga yang tinggi.
    2. Apakah lebih baik dijual secara borongan atau dijual retail.
    3. Apakah lebih baik dijual sebagian – sebagian dari bisnis atau dijual seluruh bisnis dalam 1 (satu) paket.
    4. Apakah perlu memakai perantara professional atau tidak
    5. Apakah perlu dibuatkan iklan penjualan atau tidak.

Ada kalanya pemberesan harta pailit tidak dapat dibereskan pada saat itu juga bahkan tidak dapat dibereskan sama sekali,maka kurator berhak melakukan tindakan terhadap harta pailit tersebut dengan persetujuan Hakim Pengawas. Tindakan tersebut semata – mata dilakukan kurator untuk dapat memaksimalkan boedel pailit.

Apabila Kurator menganggap perlu dan menguntungkan bagi pihak kreditor, Kurator berhak mengajukan usul untuk melanjutkan usaha perusahaan debitor pailit. Jika hal tersebut mendapatkan persetujuan maka kurator akan bertindak sebagai direksi dalam hal menjalankan usaha.

Dalam hal pengajuan usul untuk melanjutkan usaha maka kurator harus melakukan rapat untuk mendapatkan persetujuan dari para kreditor. Dalam hal pelaksanaan rapat untuk mengambil suara maka keputusan akan dianggap sah apabila suara lebih dari ½ (satu perdua) suara jumlah kreditor atau jumlah kreditor yang dating rapat kreditor. Dalam hal pelaksanaan *Going Concern* maka harus mendapatkan izin dari hakim pengawas, apabila kurator mendapatkan izin dari hakim pengawas maka pelaksanaan dari *Going Concern* dapat dilaksanakan.

Dengan adanya pelaksanaan *Going concern* maka sangat menguntungkan harta pailit karena apabila proses *Going Concern* berhasil maka asset perusahaan pailit tidak berkurang dan harta pailit semakin bertambah pada saat proses *Going Concern* dilaksanakan. Dengan melanjutkan usaha maka debitor pailit juga dapat melanjutkan kembali usahanya seletah kepailitan berakhit dan perusahaan pailit pun tidak bubar. Selain itu jika setelah proses *Going Concern* selesai dan masih terdapat harta pailit yang sisa setelah dibayarkan seluruh utang kepada kreditor maka sisa harta pilit akan dibagikan kepada pemegang saham sebatas nilai saham yang dimilikinya.

1. ***Going Concern* Pada Kepailitan PT. PPS**

Dalam hal ini yang membuat PT. Pelita Properindo Sejahtera Pailit adalah ketidakmampuan Persero ini dalam memenuhi kewajibannya terhadap para Kreditornya. PT. Pelita Properindo Sejahtera menjual unit – unit Apartemen dan ruko kepada masyarakat secara *cash indent*, dengan perjanjian unit atau ruko yang dibeli akan selesai sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Namun dalam hal kewajiban dari PT. PPS tidak dapat dipenuhi, sebagian pembeli yang telah membayar lunas dan yang tidak memperoleh haknya sesuai perjanjian yang telah diperjanjikan maka 5 (lima) orang konsumen mengajukan permohonan pailit terhadap PT. PPS didukung oleh 38 (tiga puluh delapan) pembeli lainnya yang menyatakan Kreditor dan memohon kepada Pengadilan Niaga.

Dalam Putusan Pailit di dalam perkara No. 73/ PAILIT/2009/PN.JKT.PST dimana Debitor Pailit yaitu PT. Pelita Properindo Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. PPS yang dimana Kreditornya merupakan para penghuni dari Apartemen Palazzo yang diwakili oleh kuasa hukumnya para advokat yang diberikan kuasa oleh para kreditor, yang pada tanggal 25 Januari 2010 dinyatakan pailit dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengangkat Kurator dalam hal Debitor atau Debitor dinyatakan Pailit dan Hakim Pengawas.

Dalam kepailitan Kurator dan Para Panitia Kreditor mendapatkan pertimbangan dalam hal untuk melunasi utang – utangnya kepada Para Kreditor, kegiatan usaha Debitor dapat menguntungkan kepentingan Kreditor dan Debitor, maka lebih baik perusahan tersebut tidak dilikudasi tetapi dilanjutkan, maka Kurator dapat mengajukan usul tersebut kepada Hakim Pengawas.

Dalam hal kurator mengajukan usul melanjutan usaha, kurator melampirkan alasan yang berhubungan dengan fakta – fakta yang berhubungan dengan boedel pailit yang mejadikan dasar pengajuan usulan melanjutkan usaha dalam Surat tertanggal 05 Maret 2011 Nomor : 1834/BN-AB-AK/PPS-Pailit/2011 perihal permohonan penetapan Izin melanjutkan Pembangunan Boedel Pailit PT. PPS, telah mengemukakan hal- hal sebagi berikut :

1. Setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta yang berhubungan dengan boedel pailit PT. PPS, Kurator memutuskan bahwa boedel pailit PT. PPS tidak dapat dilakukan pemberesan atau penjualan di muka umum dengan segera, karena sebagian harta pailit sama sekali tidak dapat dibereskan, karena alasan hukum dan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :
2. Unit – unit apartemen dan fasilitas lainnya merupakan harta bersama apartemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
3. Bangunan Apartement Palazzo sebanyak 5 (lima) tower belum selesai dan proresnya sangat variasi antara 20 % sampai 70 %.
4. Sebagian unit – unit apartemen yang sudah selesai, saat ini telah dihuni oleh pembeli unit sebanyak kurang lebih 200 unit.
5. Antara pembeli dan PT PPS telah terikat dengan PPJB dan sebagian besar telah membeayar lunas harga pembelian unit apartemen maupun unit ruko yang diperjanjikan.
6. Sertifikat induk maupun sebagian sertifikat yang sudah dipecah, saat ini dikuasai oleh Pihak Ketiga ( Perumnas dan PT. Bank Bukopin).
7. Seandainya Apartemen Palazzo dijual dimuka umum seperti apa adanya, tidak memiliki nilai jual yang tinggi dan merugikan kreditor, disamping akan kesulitan dalam penyerahannya baik secara legalitas maupun secara fisik karena sertifikat dikuasai pihak lain dan sebagian apartemen telah dihuni oleh pembeli unit.
8. Boedel pailit tidak dapat dibereskan dengan segera bahkan sebagian sama sekali tidak dapat dibereskan karena unit – unit apaertemen adalah satu kesatuan, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh.
9. Dalam beberapa kali rapat dan pertemuan informal dengan kreditor baik penghuni maupun perhimpunan penghuni dan beberapa kontraktor, pada umumnya kreditro berharap agar Apartemen Palazzo dilanjutkan pembangunannya guna meningkatkan nilai jual Apartemen dan mengurangi kerugian kreditor
10. Untuk melanjutkan pembangungan Apartemen Palazzo tersebut, Kurator telah mempersiapkan rencana anggaran Penyelesaian Proyek (RAPP) Apartemen Palazzo berdasarkan data – data dan perhitungan secara teknis dari projek Manager yang saat ini dipekerjakan oleh Kurator di Apartemen Palazzo (RAPP terlampir).
11. Melanjutkan pembangunan Apartemen Palazzo tersebut meliputi beberapa hal, antara lain :
12. Menyelesaikan pembangunan fisik Apartemen Palazzo sehingga kurator akan mencari beberapa kontraktor dan membuat perjanjian/ kontrk proyek dengan beberapa kontraktor tersebut.
13. Mengurus segala perizian dan hal – hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek melanjutkan pembangunan Apartemen Palazzo tersebut.
14. Mengurus sertifikat Apartemen Palazzo yang saat ini berada / dikuasai oleh pihak lain
15. Setelah pembangunan selesai, Kurator akan menyerahkan unit apartemen dengan membuat AJB dan menyerahkan sertifikat apartemen kepada seluruh Pembeli yang telah melaksanakan seluruh kewajibannya.

Dalam pengajuan usul melanjutkan usaha yang diajukan oleh Kurator dengan didasari hal-hal seperti yang dikemukakan diatas maka pada tanggal 8 Maret 2011 dalam Penetapan No. 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST maka Hakim Pengawas menetapkan sebagi berikut:

1. Mengabulkan permohonan Tim Kurator tersebut;
2. Memberi izin kepada Kurator PT. Pelita Propertindo Sejahterah (dalam pailit) untuk melanjutkan pembangunan Apartemen Palazzo sebagai boedel pailit PT. Pelita Propertindo Sejahterah (dalam pailit).
3. Memberikan izin kepada kurator mengurus segala perizinan dari instansi pemerintah maupun swasta terkait guna melanjutkan pembangunan Apartemen Palazzo
4. Mengurus sertifikat Apartemen Palazzo yang saat ini berada / dikuasai pihak lain.
5. Memberikan izin kepada Kurator untuk melanjutkan PPJB antara Debitor dengan Kreditor menjadi Perjanjian Jual Beli dan melaksanakan balik nama sertifikat atas nama Kreditro pembeli unit Apartemen

Dalam hal melanjutkan usaha dari PT. PPS dalam hal ini Apartemen Palazzo kurator harus memperjuangkan kepentingan kreditor, apabila kreditor menghendaki bahwa lebih baik Apartemen tersebut dilanjutkan usahanya dari pada dijual, maka pihak Kurator harus melakukan hal tersebut.

Dalam hal ini kurator melihat peluang untuk memaksimalkan boedel pailit dengan cara mengajukan usul melanjutkan usaha dari PT. PPS demi kepentingan para Kreditor agar Apartemen Palazzo tidak dijual melainkan dilanjutkan pembangunannya oleh Kurator agar dapat memenuhi hak-hak konsumen untuk memperoleh haknya yang berupa unit – unit Apartemen dan Ruko sebagaimana yang telah diperjanjikan dan diharapkan oleh mereka.

Setelah putusan atas Permohonan Pailit terhadap PT. Pelita Propertindo Sejahtera atau PT. PPS diucapkan pada tanggal 22 Januari 2010, yang menyatakan Debitor Pailit dengan segala akibat hukumnya, dan kemudian menunjuk dan mengangkat kurator dan Hakim Pengawas, maka setelah itu kurator langsung dapat melaksanakan tugasnya yaitu pengurusan dan pemberasan harta pailit.

Sejak adanya putusan pailit meskipun putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UUK – PKPU, dalam Ayat (2) Pasal tersebut dikatakan, dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pememberitahuan tentang putusan pembatalan yang dimaksud dalam Pasal 17 UUK – PKPU tetap sah dan mengikat Debitor.

Kurator berhak membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor Pailit. Surat – surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit, harus segera diserahkan kepada Debitor Pailit pribadi. Selanjutnya semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit harus diajukan kepada Kurator.[[126]](#footnote-126)

Berdasarkan Pasal 106 UUK-PKPU memberikan hak kepada Kurator dan menurut keadaannya memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitor pailit dan keluarganya.

Dalam Pasal 109 UUK – PKPU memberikan hak kepada Kurator, setelah meminta saran dari Panitia Kreditor (jika ada), dan dengan izin dari Hakim Pengawas, Kurator berwenang mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Dalam penyelesaian kepailitan dapat dilihat bahwa tugas dan tanggung jawab kurator tidaklah mudah dan ringan. Untuk dapat melaksanakan tugas Kurator dengan baik, selain dibutuhkan keahlian dan pengetahuan, juga dibutuhkan kesabaran, ketegasan dan kreativitas dari Kurator sendiri untuk mendukung proses penyelesaian kepailitan.

Dalam hal ini tindakan kurator dalam menyelesaikan kepailitan dengan cara mengoperasikan perusahaan merupakan tindakan yang cukup berani dan penuh resiko, karena dalam hal ini kurator harus terlibat dalam urusan professional lain diluar bidang hukum dan tugas – tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Hal – Hal yang dilakukan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit yaitu Mengajukan Usulan Izin Melanjutkan Pembangunan Apartemen sebagi Boedel Pailit.

Faktor – factor serta alasan kurator dalam mengambil keputusan menempuh jalan untuk melanjutkan usaha (*Going Concern)*:

1. Dari fakta – fakta yang berhubungan dengan boedel pailit dalam PT. PPS tersebut kurator memutuskan bahwa terhadap boedel pailit tersebut tidak dapat dilakukan pemberesan atau penjualan dimuka umum dengan segera bahwa sebagian sama sekali tidak bisa dibereskan, karena alasan hukum dan pertimbangan sebagai berikut :
2. Unit – unit apartemen dan fasilitas lainnya merupakan harta bersama apartemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
3. Bangunan Apartement Palazzo sebanyak 5 (lima) tower belum selesai dan proresnya sangat variasi antara 20 % sampai 70 %.
4. Sebagian unit – unit apartemen yang sudah selesai, saat ini telah dihuni oleh pembeli unit sebanyak kurang lebih 200 unit.
5. Antara pembeli dan PT PPS telah terikat dengan PPJB dan sebagian besar telah membeayar lunas harga pembelian unit apartemen maupun unit ruko yang diperjanjikan.
6. Sertifikat induk maupun sebagian sertifikat yang sudah dipecah, saat ini dikuasai oleh Pihak Ketiga ( Perumnas dan PT. Bank Bukopin).
7. Seandainya Apartemen Palazzo dijual dimuka umum seperti apa adanya, tidak memiliki nilai jual yang tinggi dan merugikan kreditor, disamping akan kesulitan dalam penyerahannya baik secara legalitas maupun secara fisik karena sertifikat dikuasai pihak lain dan sebagian apartemen telah dihuni oleh pembeli unit.
8. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Boedel Pailit tidak dapat dibereskan dengan segera karena unit – unit apartemen adalah satu kesatuan, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh.
9. Dalam beberapakali rapat dan pertemuan informasi dengan kreditor baik penghuni maupun perhimpunan penghuni dan beberapa kontraktor, pada umumnya kreditor berharap agar Apartemen Palazzo dilajutkan pembangunannya guna meningkatkan nilai jual Apartemen dan mengurangi kerugian kreditor.

Faktor – faktor yang disertai alasan – alasan disampaikan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas agar diperkenankan untuk melanjutkan Pembangunan Apartemen tersebut dan Hakim Pengawas kemudian menyetujui dengan mengeluarkan Penetapan pada tanggal 8 Maret 2011.

Tentang keputusan dan rencana Kurator, Kurator kemudian mengajukan Permohonan Izin kepada Hakim Pengawas. Atas Permohonan Kurator mengenai hal tersebut, Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan pada tanggal 8 Maret 2011 :

1. Memberi izin kepada kurator melanjutkan pembangunan Apartemen Palazzo sebagai boedeol pailit PT. PPS (dalam pailit)
2. Memberi izin kepada Kurator, mengurus perizinan dari Instansi Pemerintah maupun swasta terkait guna melanjutkan pembangunan
3. Mengurus sertifikat Apartemen Palazzo yang saat itu berada/dikuasi oleh Pihak lain
4. Memberi Izin kepada Kurator untuk melanjutkan PPJB menjadi perjanjian Jual Beli dan melaksanakan Balik Nama Sertifikat ke atas nama Kreditor Pembeli Unit Apartemen.

Setelah Penetapan Izin melanjutkan usaha dikeluarkan oleh Hakim Pengawas, Para Kurator mulai melakukan pekerjaannya dalam menjalankan Perusahaan.

Kurator sendiri memiliki banyak tugas dan peran dalam hal melanjutkan kegiatan usaha Debitor Pailit yaitu PT. PPS setelah adanya penetapan dari Hakim Pengawas.

Pada penetapan Kurator memulai tugasnya dengan meyakinkan para Kreditor dimana kreditor dalam perkara pailit tersebut lebih dari seribu kreditor dan pada dasarnya kreditor telah kehilang kepercayaan kepada Debitor, yang pada awalnya debitor sempat mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor dan rencana tersebut ditolak oleh para kreditor.

Dalam hal meyakinkan kreditor, kurator menawarkan sesuau yang lebih baik, lebih baik daripada likuidasi, dan lebih baik ari rencan perdamaian yang dilakukan oleh debitor pailit. Setelah mendapatkan kepercayaan kreditor pailit maka Kurator mulai mencari dana untuk melanjutkan pembanguan Apartemen Palazzo yang pada dasarnya PT.PPS telah memiliki utang besar kepada beberapa supplier dan kontraktor yang harus dibayar oleh kurator, selain itu masih banyak biaya biaya operasional yang harus disiapkan oleh kurator.

Dalam hal ini Kurator mengambil sumber dana dari Kas dan tagihan – tagiahan PT.PPS, penjualan saham PT.PPS , dan hasil hasil lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh kurator.

Pada saat ini Apartemen Palazzo (dalam Pailit) berubah nama menjadi Grand Palace Kemayoran. Hal ini dikemukakan oleh salah satu kurator yaitu Bernard Nainggolan dalam bukunya Peran Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit, bahwa untuk menarik minat pembeli baru, para kurator berusaha melakukan langkah – langkah strategis memperbaharui citra atau *leverage* *branding* Apartemen ini, seperti mengganti nama Apartemen Palazzo menjadi Grand Palace Kemayoran, menggandeng kerja sama dengan perusahaan – perusahaan untuk ikut di apartemen, seperti Bank untuk membuka ATM, Minimarket, membuka *foodcourt*, apotek, dan terakhir membuat sebagian unit menjadi komdominium Hotel (Kondotel). Dengan menggandeng perusahaan hotel yang punya jaringan global yaitu Best Western.[[127]](#footnote-127)

Hal – hal tersebut dilakukan oleh Kurator untuk memenuhi hak – hak dari Kreditor , meningkatkan citra, value dan mutu dari Apartemen Palazzo dengan berbagai cara dan strategi.

Saat ini Apartemen Grand Palace Kemayoran ( Apartemen Palazzo ) sangat berkembang dibawah pengurusan Kurator yang pada saat ini apartemen tersebut telah selesai membangun 5 (lima) tower yang telah siap huni dan telah menjual banyak unit – unit baru. Maka saaat ini Apartemen tersebut merupakan komplek hunian yang nyaman, dinamis, dan bernilai tinggi.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**
2. Pembubaran Terjadi karena :
3. Berdasarkan Keputusan Berdasarkan keputusan RUPS;
4. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telahberakhir;
5. Berdasarkan penetapan pengadilan;
6. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
7. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
8. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepailitan merupakan sita umum terhadap harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator dalam pengawasan Hakim Pengawas. Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit pada dasaranya telah kehilangan Hak Keperdataannya untuk mengurus harta pailitnya yang selanjutnya pengurusan dan pemberesan tersebut beralih kepada Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

1. Pembubaran Perseroan Terbatas tidak kehilangan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas secara langsung. Pembubaran Perseroan Terbatas adalah berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas berupa Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia disertai dengan penghapusan ijin TDP di Kota/Kabupaten/ Kota Madya yang dilakukan melalui dinas perijinan dan ketika ijin penghapusan tersebut sudah keluar maka selesau sudah proses Pembubaran Perseroan Terbatas dan badan hukumnya sudah terhapuskan. Pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, status badan hukum baru berakhir dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidasi diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pengadilan Niaga.

Pada dasarnya Perusahaan yang telah dinyatakan pailit pada saat pengurusan dan pemberseran harta pailit, kurator memilih untuk menjual asset – asset Debitor pailit untuk melunasi atau melaksanakan kewajiban dari Debitor pailit kepada Kreditor. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya masih ada boedel atau kewajiban dari Debitor pailit yang tidak adapat dibereskan ataupun Boedel pailit yang tidak mencukupi maka Kurator harus memaksimalkan Boedel Pailit agar Kreditor tidak dirugikan. Dalam memaksimalkan Boedel Pailit apabila dianggap perlu dan menguntungkan pihak Kreditor, mala Kurator berhak mengajukan usul untuk melanjutkan usaha perusahaan Debitor Pailit. Dalam pertimbangan beroperasinya usaha dari Perseroan Terbatas yang Pailit maka dimungkinkan adanya keuntungan yang akan diperoleh diantaranya yaitu dapat menambah harta Debitor Pailit dengan keuntungan – keuntungan yang mungkun lambat laun Debitor Pailit akan dapat membayar utangnya secara penuh dan kemungkinan tercapai suatu perdamaian.

1. **SARAN**

Dalam hal terjadi kepailitan Kurator harus dapat melihat prosepek dari suatu boedel pailit apakah boedel tersebut dapat dilanjutkan kembali usahanya atau tidak, karena apabila dianggap perlu dan menguntungkan pihak Kreditor dan bahkan dapat membantu Debitor pailit dalam melunasi utang-utangnya maka sebaiknya dilanjutkan usaha dari Debitor pailit untuk memaksimalkan Boedel pailit tersebut.

Kurator memiliki kewenanga yang besar untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan mutu dari Boedel Pailit demi kepentingan para kreditor. Jika kurator lebih mau berpikir dan berusaha untuk kepentingan para kreditor dan para kurator harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal kasus pailit serta akuntansi, manajemen, keuangan, pemasaran, dan sebagainya, serta kurator harus berani melakukan terobosan – terobosan baru untuk dapat memaksimalkan Boedel Pailit dan untuk memenuhi kepentingan para Kreditor secara optimal. Namun, kurator juga harus berhati-hati dalam melaksanakan proses *Going Concern* karena apabila kurator gagal melaksanakan proses tersebut maka boedel pailit tidak dapat dioptimalkan melainkan dapat merugikan boedel pailit yang ada.

Pelaksanaan Going Concern ini dapat merupakan terobosan bagi para debitur untuk dapat menghadapi kendala likuiditas sementara sehingga dengan melanjutkan usaha para debitur dapat mengoptimaklan boedel pailit yang ada dan apabila berhasil maka asset perusahaan pailit tidak berkurang adan harta pailit dapat bertambah pada saat proses *Going concern*  dilaksanakan sehingga pada debitur pailit dapat terbebas dari pembubaran perseroan terbatas.

Penulis beranggapan bahwa Pemerintah juga perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Undang – Undang Kepailitan dan PKPU untuk dapat lebih disempurnakan kembali, karena dalam hal melanjutkan usaha tersebut sangatlah luas dan kompleks maka hal tersebut dapat menjadi masukan bagi para pembuat Undang – Undang dalam penyempurnaan UUK – PKPU dimasa yang akan datang.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU-BUKU**

**A. Abdurrachman,** 1991, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan,*(Jakarta: Pradya Pramita).

**Abdukadir, Muhammad,** 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya).

**Ali, Zainuddin,** 2014, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

**Amiruddin dan H. Zainal Asikin,** 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

**Asyhadie, H. Zaenak dan Budi Sutrisno,** 2012 *Hukum Perusahaan dan Kepailitan,* (Jakarta: Erlangga).

**Asikin, Zainal,** 1991, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers).

--------------------, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia,* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada).

--------------------, 2013, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Reka Cipta).

**Astuti, Partiwi Dwi,** 2012 *Akuntansi Keuangan Dasar 1*, (Yogyakarta : CAPS).

**Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisna,** 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama).

**Budiarto, Agus,** 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)*.*

**Fuady, Munir,** 2010, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

**Harahap, M. Yahya,** 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika).

**Hartono, Siti Soemarti,** 1993, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM).

**Hery,** 2014, *Akuntansi Untuk Pemula*, (Yogyakarta : Penerbit Gava Media).

**Ibrahim, Johannes,** 2006 *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama).

**Ibrahim, Johnny,** 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing).

--------------------, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing).

**Idrus, Muhammad,** 2007, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (angora IKAPI)).

**Islahuzzaman,** 2012, *Istilah – istilah akuntansi dan auditing,* ( Jakarta: Bumu Aksara).

**Irawan, Bagus,** 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, (Bandung: P.T. ALUMNI).

**Jauhari, Heri,** 2009, *Panduan Penulisan Skripsi: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).

**Jono,** 2010, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika).

**Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil,** 2009, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

**Khairandy, Ridwan,** 2006, Pengantar Hukum Dagang, (Yogyakarta: FH UII Press).

**Lontoh, Rudy A., dkk,** 2001, Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: PT. Alumni).

**Manik, Edward,** 2012, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Bandar Maju).

**Muhammad, Abdulkadir,** 1999, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

**Mulhadi,** 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk – Bentuk Badan Usaha di Indonesia,* ( Bogor : Ghalia Indonesia).

**Nainggolan, Bernard,** 2014 *Peranan Kurator Dalam Pemeberesan Boedel Pailit*, ( Bandung : PT Alumni).

**Nating, Imran,** 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

**Purwosutjipto, H.M.N.,** 1981 Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1, (Jakarta: Djambatan).

**Rianto, Adi,** 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit).

**Salim, Peter dan Yenny Salim,** 1991, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama, (Jakarta: Modern English Press).

**Sastrawidjaja, Man,** 2006 *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* (Bandung: PT Alumni).

**Sinaga, Syamsudin M.,** 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa).

**Sinaga, Valerie Selvie (ed.),** 2005, *Analisa Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Jakarta*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya).

**Situmorang, Victor M. & Hendri Soekarso,**1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta).

**Sjahdeni, Sutan Remi,** 2004, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillisementsverordening Juncto Undang – Undang No. 4 Tahun 1998,* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).

**Soekanto, Soerjono,** 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta).

**Soemitro, Ronny Hanitijo,** 1990,Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

**Subekti dan R. Tjitrosoedibio,** 1978, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita).

**Subhan, Hadi,** 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prnada Media Group).

**Sunarmi,** 2010, *Hukum Kepailitan Edisi* 2, (Jakarta: PT. Sofmedia).

**Sunarmi,** 2010,Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi 2, A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debitor Interest, (Jakarta: PT. Sofmedia).

**Supramono, Gatot,** 2013, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

**Suryana, Daniel,** 2007, Hukum Kepailitan: Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia, (Bandung: Pustaka Sutra).

**Susilowati, Etty,** 2013, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

**Sutedi, Andrian,** 2009, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia).

**Widijowati, Rr. Dijan,** 2012, Hukum Dagang, (Yogyakarta: CV. Andi Offset).

**Widjaja, Gunawan,** 2003, Tangggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

--------------------, 2008,150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta: ForumSahabat).

--------------------, 2008, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham (Mengulas Secara Rinci, Tuntas dan Menyeluruh: Proses Peningkatan & Penurunan Modal, Berbagai Larangan Pemilikan & Pengeluaran Saham dan Jenis-Jenis Saham, (Jakarta: ForumSahabat).

**Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja,** 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa).

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
   1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   2. Kitab Undang-Undang Hukum dagang
   3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
   4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
   5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
   6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

1. Muhammad,Abdukadir,*Hukum Perusahaan Indonesia*,(Bandung: Citra Aditya,2006) hal 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. H, Zaenak Asyhadie, Budi Sutrisno,”*Hukum Perusahaan dan Kepailitan”,*(Jakarta:Erlangga,2012), Hal 10-11. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*, Hal 37-38. [↑](#footnote-ref-3)
4. Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), Hal 99. [↑](#footnote-ref-4)
5. Victor M, Situmorang & Hendri Soekarso,”*Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia”,*(Jakarta:Rineka Cipta,1994),hal 6 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi* 2,(Jakarta: PT. Sofmedia, 2010),hal 69. [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Hadi Shubhan, *Op.cit.* Hal 144 [↑](#footnote-ref-7)
8. Eliyana dalam M.Hadi Shubhan, *Op.cit.,* hal 135 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*,hal 49. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Loc.cit,* Hal 146 [↑](#footnote-ref-10)
11. Islahuzzaman, *Istilah – istilah akuntansi dan auditing,* ( Jakarta : Bumu Aksara, 2012), Hal 164. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prnada Media Group, 2008), hal 1 [↑](#footnote-ref-12)
13. Syamsudin M. Sinaga,”Hukum Kepailitan Indonesia”, (Jakarta : Tatanusa, 2012) hal 6 [↑](#footnote-ref-13)
14. M. Yahya Harahap, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). Hal 556. [↑](#footnote-ref-14)
15. Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal 47. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* hal 48. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* hal 48-49. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kartini Mulyadi dalam Hadi Subhan, *ibid.* hal 27-28. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* hal 29. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* hal 32. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* hal 34. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* hal 38. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*. hal 41. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* hal 43. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* hal 47. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* hal 48. [↑](#footnote-ref-27)
28. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, 1984) hal 42. [↑](#footnote-ref-28)
29. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)*.,* hal 19. [↑](#footnote-ref-29)
30. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), hal 295. [↑](#footnote-ref-30)
31. Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal 57. [↑](#footnote-ref-31)
32. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,(Surabaya:Bayumedia Publishing,2006) hal 141 [↑](#footnote-ref-32)
33. Patton dalam Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, *2009*), hal 137. [↑](#footnote-ref-33)
34. Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)*,* Hal 15 [↑](#footnote-ref-34)
35. *ibid*, Hal 16 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid,* Hal 24. [↑](#footnote-ref-36)
37. Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk – Bentuk Badan Usaha di Indonesia,* ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), Hal 81 [↑](#footnote-ref-37)
38. M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, Hal 33 [↑](#footnote-ref-38)
39. Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisna, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2012), Hal 92. [↑](#footnote-ref-39)
40. Jono, *op.cit.,* Hal 59. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ricardo Simanjuntak “Kepailitan dan Likuidasi (Studi Kasus : BPPN vs PT Muara Alas Prima)”, Dalam : Valerie Selvie Sinaga (ed.), *Analisa Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Jakarta*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, 2005). Hal 185 [↑](#footnote-ref-41)
42. Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek,* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2010)*.,* Hal. 178 [↑](#footnote-ref-42)
43. Yahya Harahap, *Op.cit.,* Hal 543 [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid*, Hal 545-548 [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid*, Hal 548-549 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid*, Hal 549-552 [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid*, Hal 552-554 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*, Hal 554-555 [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid*, Hal 555-556 [↑](#footnote-ref-49)
50. Etty Susilowati, *Op.cit.*, Hal. 11 [↑](#footnote-ref-50)
51. Zainal, Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia,* (Bandung : Pustaka Reka Cipta,2013) Hal 23 [↑](#footnote-ref-51)
52. *ibid*, Hal 24 [↑](#footnote-ref-52)
53. Bagus, Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, (Bandung : P.T. ALUMNI, 2007), Hal 15 [↑](#footnote-ref-53)
54. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002), Hal 11. [↑](#footnote-ref-54)
55. Abdurrachman, A, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan,*(Jakarta: Pradya Pramita, 1991), Hal 303 [↑](#footnote-ref-55)
56. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita,1978), Hal 89. [↑](#footnote-ref-56)
57. Andrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), Hal 24. [↑](#footnote-ref-57)
58. Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal 19. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ibid, Hal 20 [↑](#footnote-ref-59)
60. Munir Fuady,*Op.cit*, Hal 8 [↑](#footnote-ref-60)
61. Op.cit, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Hal 20 [↑](#footnote-ref-61)
62. Loc.cit, Hal 19 [↑](#footnote-ref-62)
63. Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), Hal 24. [↑](#footnote-ref-63)
64. Zainal Asikin, Op.cit., Hal 25 [↑](#footnote-ref-64)
65. Rahayu Hartini, *Op.cit.,* Hal 22 [↑](#footnote-ref-65)
66. Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillisementsverordening Juncto Undang – Undang No. 4 Tahun 1998,* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004), Hal 38-39 [↑](#footnote-ref-66)
67. Man Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* ( Bandung : PT Alumni, 2006 ), Hal 89 [↑](#footnote-ref-67)
68. Jono, *Op.cit.,* Hal 5 [↑](#footnote-ref-68)
69. Etty Susilowati, *Op.cit.,* Hal 43 [↑](#footnote-ref-69)
70. Jono, *Op.cit.,* Hal 10 [↑](#footnote-ref-70)
71. Etty Susilowati, *Op.cit.,* Hal 44 [↑](#footnote-ref-71)
72. Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia,*(Jakarta : Tianusa,2012), Hal 91 [↑](#footnote-ref-72)
73. Sutan Remy Sjahdeni, *Op.cit.,* Hal 38-39 [↑](#footnote-ref-73)
74. *ibid.,* Hal 57 [↑](#footnote-ref-74)
75. Jono, *Op.cit.,* Hal 12 [↑](#footnote-ref-75)
76. *Loc.cit* [↑](#footnote-ref-76)
77. *Loc.cit* [↑](#footnote-ref-77)
78. Jono, *Op.cit.,* Hal 89. [↑](#footnote-ref-78)
79. Rahayu Hartini, *Op.cit.,* Hal 103. [↑](#footnote-ref-79)
80. Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.,* Hal 255-256. [↑](#footnote-ref-80)
81. Munir Fuady*,Op.cit.*, hlm.61-62 [↑](#footnote-ref-81)
82. Sutan Remi Syahdeini, *Op.cit*., Hal 257 [↑](#footnote-ref-82)
83. Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.,* ( Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), Hal 193. [↑](#footnote-ref-83)
84. Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia,* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001 ), Hal 57. [↑](#footnote-ref-84)
85. Jono, *Op.cit., Hal 108* [↑](#footnote-ref-85)
86. Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), hlm. 43-52. [↑](#footnote-ref-86)
87. Islahuzzaman, *Istilah – istilah akuntansi dan auditing,* ( Jakarta : Bumu Aksara, 2012), Hal 164. [↑](#footnote-ref-87)
88. Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemeberesan Boedel Pailit*, ( Bandung : PT Alumni, 2014) Hal 74. [↑](#footnote-ref-88)
89. Hery, *Akuntansi Untuk Pemula*, ( Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2014), Hal 2. [↑](#footnote-ref-89)
90. Partiwi Dwi Astuti, *Akuntansi Keuangan Dasar 1*, ( Yogyakarta : CAPS, 2012), Hal 11. [↑](#footnote-ref-90)
91. Bernard Nainggolan, *Op.cit.,* Hal 77 [↑](#footnote-ref-91)
92. Loc.cit [↑](#footnote-ref-92)
93. Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta : Total Media Yogyakarta, 2009) Hal. 325 [↑](#footnote-ref-93)
94. M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, Hal 545-548 [↑](#footnote-ref-94)
95. *Ibid*, Hal 548-549 [↑](#footnote-ref-95)
96. Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, cetakan 1, (Jakarta : Permata Aksara, 2012), Hal, 165 [↑](#footnote-ref-96)
97. M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, Hal 549- [↑](#footnote-ref-97)
98. Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2007) Hal 106 [↑](#footnote-ref-98)
99. M. Yahya Harahap, *Op.cit.,* Hal 550-552 [↑](#footnote-ref-99)
100. Gatot Supramono, *Op.cit.,*Hal 107 [↑](#footnote-ref-100)
101. Marsh and Soulsby, *Business Law, 5th Edition* (London : McGraw-Hill Book Company Europe, 1992), Hal 76. [↑](#footnote-ref-101)
102. *Ibid*, Hal 552-554 [↑](#footnote-ref-102)
103. *Ibid*, Hal 554-555 [↑](#footnote-ref-103)
104. Ridwan Khairandy, *Op.cit*., Hal 333 [↑](#footnote-ref-104)
105. *Ibid*, Hal 555-556 [↑](#footnote-ref-105)
106. H.A.J. Ford and R.P. Austin, *Principles of Corporations Law, 7 th Edition,*( Autralia : Buttweworths, 1995), Hal 1048 [↑](#footnote-ref-106)
107. Ridwan Khairandy,*Op.cit,*Hal 340. [↑](#footnote-ref-107)
108. E.R Hardy Ivamy, *Topham & Ivamy’s Company Law, 16th Edition* (London : Butterworth &co, 1978) Hal 432. Di inggris setelah pengadilan menetapkan pembubarann Perseroan terbatas Likuidator wajib mendaftarkan penetapan terserbut ke dalam “*registrar of companies*” sebagai bentuk pelaksanaan asas publisitas. [↑](#footnote-ref-108)
109. H, Zaenak Asyhadie, Budi Sutrisno, ”*Hukum Perusahaan dan Kepailitan”,* (Jakarta:Erlangga,2012), Hal. 69-75. [↑](#footnote-ref-109)
110. M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 545. [↑](#footnote-ref-110)
111. Siti Soemarti Hartono,*Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1993), Hal 4 [↑](#footnote-ref-111)
112. Bernard Nainggolan*,Op.cit.,* Hal 75 [↑](#footnote-ref-112)
113. Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang – Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2004) Hal 42-60. [↑](#footnote-ref-113)
114. Bernerd Nainggolan,*Op.cit*, Hal 74. [↑](#footnote-ref-114)
115. M. Hadi Shubhan, *Op.cit*, Hal 137 [↑](#footnote-ref-115)
116. Bernard Nainggolan*, Op.cit*. Hal. 74 [↑](#footnote-ref-116)
117. *Loc.cit.,* [↑](#footnote-ref-117)
118. Bernard Nainggolan, *Op.cit.,* Hal 76 [↑](#footnote-ref-118)
119. Bernard Nainggolan, *Op.cit.,*Hal 85-86 [↑](#footnote-ref-119)
120. Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.,* Hal 256 - 257 [↑](#footnote-ref-120)
121. Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.,* Hal 257 [↑](#footnote-ref-121)
122. Etty S Suhardo,*Op.cit.*, Hal 151. [↑](#footnote-ref-122)
123. Bernard Nainggolan,*Op.cit.,* Hal 52-53 [↑](#footnote-ref-123)
124. Bernard Nainggolan, *Op.cit.,*Hal 64 [↑](#footnote-ref-124)
125. Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek,*(Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005), Hal 49 [↑](#footnote-ref-125)
126. Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit,* (Jakarta : Forum Sahabat, 2009), Hal 110 [↑](#footnote-ref-126)
127. Bernard Nainggolan, *Op.cit.,Hal 169 - 170* [↑](#footnote-ref-127)